

**Implementasi Ketahanan Pangan dan Pertanian oleh FAO pada Isu Krisis Pangan di
Sudan Tahun 2020-2022**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:
MUTIYANA IZZATY

NIM

20323117

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**Implementasi Ketahanan Pangan dan Pertanian oleh FAO pada Isu Krisis Pangan di
Sudan Tahun 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial
Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

MUTIYANA IZZATY

20323117

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Implementasi Ketahanan Pangan dan Pertanian oleh FAO pada Isu Krisis

Pangan di Sudan Tahun 2020-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
18 Januari 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia




Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

1. Gustri Eni Putri, S.IP., M.A
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 8 Januari 2024



MUTIYANA IZZATY

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan berkah karunia yang diberikan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurah dan limpahkan kepada nabi besar kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak sekali dukungan, bimbingan, dorongan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridha kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan rintangan yang dihadapi.
2. Seluruh Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu, pelajaran, dukungan, nasihat sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Karina Utami Dewi selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Gustrieni Putri, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang kompetitif dan tidak pernah Lelah untuk membimbing penulis dan selalu memberi semangat dan solusi ketika penulis menemukan hambatan dalam penulisan skripsi ini.
5. Mama, Papa, dan keluarga besar yang selalu mengingatkan, memberi semangat tanpa henti, membantu menyelesaikan segala urusan dari yang kecil hingga besar.
6. Sersan Mayor Satu Taruna Ranga Tanuwijaya yang selalu menjadi tempat keluh kesah, memberi semangat dan bantuan dalam penulisan dan menemani hingga akhir penulisan.
7. Putri, Elang, Dwipa, Kia, Alghi, Bila, Nadya, Jihan, Cici, Novia Danit yang sudah sering memberi bantuan dan semangat, hiburan kala stress yang selalu hadir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Atas segala bentuk bantuan dan dukungan selama ini, semoga dilimpahkan kebaikan oleh Allah SWT. Harapan penulis, semoga karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi banyak orang bahkan Negara

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mutiyana Izzaty', with a small star above the 'i' in 'Mutiyana' and a double underline below the 'y' in 'Izzaty'.

MUTIYANA IZZATY

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka.....	5
1.6. Kerangka pemikiran.....	9
1.7. Argumen Sementara.....	13
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	13
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	14
BAB 2 KRISIS PANGAN DI SUDAN DAN KEGAGALAN PEMERINTAH SUDAN DALAM MENGATASINYA	16
2.1. Kondisi krisis pangan di Sudan pada tahun 2020-2022	16
2.2. Ketidakmampuan Peran Pemerintah Sudan dalam Mengatasi Permasalahan Krisis Pangan 2020.	26
2.3. Masuknya FAO untuk membantu Sudan	28
2.3.1 Sejarah masuknya FAO untuk Membantu Sudan	29
2.3.2 Aktor-aktor lain yang terlibat dalam membantu FAO	30
BAB 3 IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN OLEH FAO DI SUDAN 2020-2022	34
3.1 Pengawasan oleh FAO.....	34

3.1.1 Pengawasan FAO bersama Kementerian Pertanian Sudan.....	35
3.1.2 Pengawasan oleh FAO berdasarkan laporan Bank Dunia.....	39
3.1.3 Pengawasan oleh FAO berdasarkan laporan NESI (News Sudanese Indigenous NGO's South Sudan).....	40
3.2. Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Masalah Oleh FAO.....	40
3.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Masalah Oleh FAO Melalui Program FNS-REPRO.....	41
3.2.2. Bantuan Financial dan Technical Oleh FAO Untuk Krisis Pangan Sudan.....	47
3.3. Otoritas dan Legitimasi FAO dalam mengatasi krisis pangan dan pertanian di Sudan	49
BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1 Grafik Kenaikan Kasus Krisis Pangan Sudan dari 2019 ke 2020

Gambar 2.3.2 Produsen Penurunan Hasil Pangan

Gambar 2.3.3 Grafik Kenaikan Harga Sorgum dan Millet

Gambar 2.3.4 Kesulitan Utama Produksi Ternak

Gambar 2.3.5 Peta Daerah Sudan Dengan Kondisi Terburuk Akibat Krisis Pangan 2020-2021

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6.1 Peta Konsep Teori Peran Organisasi Internasional Joachim

Tabel 2.3.1 Penurunan Produksi Bahan Makanan Pokok Sudan

Tabel 2.3.2 Kenaikan Harga Pangan Hewani

Tabel 3.2.1.1 Penerima Manfaat Program FNS-REPRO

Tabel 3.2.1.2 Total Penerima Manfaat FNS- REPRO

DAFTAR SINGKATAN

ACFASM : *Annual Crop and Food Supply Assessment Mission*

CEN : *Country Engagement Note*

FAO : *Food and Agriculture Organization*

FFEM : *French French Facility for Global Environment*

FNS-REPRO : *Food and Nutrition Security Resilience Programme*

FWS NET: *Famine Early Warning System Network*

IFRC : *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*

IMS : *International Monetary Fund*

LSM : *Lembaga Swadaya Masyarakat*

MoANR: *Ministry of Agriculture and Natural Resources*

PBB : *Perserikatan Bangsa-Bangsa*

PRRO : *Program Protected Relief and Recovery Operation*

QUBI: *Quasi Universal Basic Income*

SAM : *Severe Acutely Malnourished*

WFP : *World Food Program*

WBG : *World Bank Global*

ABSTRAK

Krisis pangan merupakan sebuah isu kemanusiaan yang keadaannya sangat darurat karena menyangkut kehidupan manusia. Krisis pangan di Sudan pada tahun 2020 merupakan krisis pangan darurat internasional yang mana disebabkan oleh covid 19, dan banjir bandang. Mayoritas masyarakat Sudan tidak mendapatkan akses pangan yang cukup akibat rusaknya pertanian, kurangnya produksi bahan makanan pokok dan tingginya harga bahan makanan pokok. Keadaan yang sangat memprihatinkan ini membuat pemerintah Sudan kewalahan dalam menangani permasalahan krisis pangan Sudan, dimana usaha pemerintah Sudan mengalami kegagalan dalam mengatasi isu krisis pangan. Adanya hal tersebut, tentunya organisasi internasional dunia bidang pangan dan pertanian yaitu FAO (*Food And Agriculture Organizations*) turun tangan untuk membantu meringankan Sudan dalam menghadapi krisis pangan. FAO melakukan berbagai kegiatan dan program untuk mengatasi krisis pangan Sudan dan tidak luput dari kerja sama dari berbagai aktor. Dalam kasus ini menarik untuk dibahas terkait krisis kemanusiaan yang darurat yang terjadi di Sudan melalui teori peran organisasi internasional Joachim.

Kata kunci: Sudan, Krisis Pangan, Covid-19, FAO, Kelaparan, Keamanan Manusia

ABSTRACT

The food crisis is a humanitarian issue which is a very emergency situation because it concerns human life. The food crisis in Sudan in 2020 is an international emergency food crisis which was caused by Covid-19 and flash floods. The majority of Sudanese people do not have access to sufficient food due to damage to agriculture, lack of production of staple foods and high prices of staple foods. This very worrying situation has made the Sudanese government overwhelmed in handling the Sudanese food crisis problem, where the Sudanese government's efforts have failed in overcoming the issue of the food crisis. Due to this, of course the world international organization in the field of food and agriculture, namely FAO (Food And Agriculture Organizations), stepped in to help ease Sudan in facing the food crisis. FAO carried out various activities and programs to overcome Sudan's food crisis and did not escape cooperation from various actor. In this case, it is interesting to discuss the emergency humanitarian crisis that occurred in Sudan through Joachim's theory of the role of international organizations.

Keywords: Sudan, Food Crisis, Covid-19, FAO, Hunger, Human Securit

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis pangan adalah keadaan ketika masyarakat mengalami kelangkaan pangan dan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Krisis pangan juga dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang darurat karena hal tersebut dapat membahayakan kehidupan umat manusia di sebuah lingkungan. Krisis pangan yang dialami oleh masyarakat dalam suatu wilayah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan iklim yang tidak terkontrol, bencana alam dan bencana lingkungan, serta dapat disebabkan karena sebuah perang ataupun konflik sosial (Alexander 2018)

Sementara itu, menurut PBB krisis pangan diartikan sebagai sebuah situasi dimana terjadi kekurangan gizi yang tinggi karena kerawanan pangan di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini juga menandakan bahwa kebutuhan pangan adalah salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam menjaga stabilitas sosial dalam sebuah negara (Andersen 2009).

Krisis pangan adalah salah satu isu yang berkaitan dengan keamanan manusia yang tidak sedikit dialami oleh beberapa negara di dunia. Kawasan yang paling sering mengalami dan memiliki angka krisis pangan yang besar di dunia adalah kawasan Afrika. Negara kawasan Afrika merupakan negara yang identik dengan curah hujan rendah dan kering, yang menjadi salah satu penyebab sulitnya memproduksi tanaman penghasil makanan pokok, salah satunya adalah negara Sudan. Sektor pertanian serta curah hujan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Sudan. Kondisi krisis pangan di Sudan ini sebenarnya bukan merupakan kasus baru, tetapi krisis pangan di Sudan selalu mewarnai kehidupan masyarakat Sudan sejak pasca referendum konflik. Mengingat letak wilayah Sudan berada di zona tropis dan wilayah Sudan

mayoritas gurun pasir yang sangat luas, iklim dan lingkungan negara Sudan tidak terlalu mendukung untuk bercocok tanam dan tidak heran apabila Sudan mengalami kekeringan sehingga menimbulkan krisis pangan (Patricia 2020).

Meskipun krisis pangan di Sudan sudah lazim mewarnai kehidupan masyarakat Sudan. Pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan tahun terburuk Sudan dalam mengalami krisis pangan. Hal ini ditunjukkan oleh laporan PBB bahwa 2020 silam tercatat sebanyak 9,6 juta masyarakat Sudan mengalami kekurangan gizi dan diperburuk karena adanya COVID-19 serta bencana banjir bandang yang menerjang sebagian besar wilayah Sudan sehingga menyebabkan aktivitas pertanian terganggu dalam memproduksi bahan pangan pokok masyarakat Sudan yaitu gandum, sorghum, millet dan pangan hewani seperti daging kambing, unta. Covid-19 menyebabkan aktivitas pertanian produksi makanan pokok terhambat yang menyebabkan gagal panen produksi bahan makanan pokok seperti gandum, sorghum dan millet (Abishkar 2021).

Selain itu, banjir bandang yang menyebabkan sebagian besar lahan petani rusak dan hal tersebut menyebabkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kelangkaan akses makanan pokok seperti gandum, sorghum dan millet, terlebih lagi karena kelangkaan tersebut yang menyebabkan harga sorghum, millet dan gandum naik secara drastis. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Sudan tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan pokok seperti gandum, sorghum, millet akibat gagal panen yang menimbulkan kelangkaan dan harga yang naik secara drastis. Hal tersebut dilaporkan oleh badan informasi keamanan pangan dan produk yaitu Food Security Information Network, dimana indikator nutrisi Sudan sangat memprihatinkan dan mengalami isu krisis pangan yang ekstrem. Food Security Information melaporkan bahwa banyak masyarakat Sudan mengalami kekurangan gizi yang kritis hingga beberapa diantaranya termasuk dikategorikan sebagai SAM (*Severe Acutely Malnourished*) dimana mereka mengalami kekurangan kebutuhan gizi, dan nutrisi (Sussane 2021).

Krisis pangan pada tahun 2020 tersebut mengakibatkan hanya 15% penduduk Sudan yang memiliki keenuhan syarat keragaman pangan seperti mendapatkan akses bahan pangan pokok dan pangan hewani yang cukup, yang menandakan bahwa mayoritas penduduk Sudan tidak memiliki keragaman pangan yang cukup (Food Security Information Network 2020). Dibandingkan dengan tahun 2019, di tahun 2020 tercatat peningkatan tersebut sebesar 65% lebih tinggi. Hal tersebut merupakan keadaan yang darurat, karena keamanan manusia masyarakat Sudan lebih terancam disebabkan oleh krisis pangan yang semakin diperburuk karena adanya peningkatan angka krisis pangan yang tinggi akibat covid 19 dan banjir bandang (Herforth 2020).

Menanggapi isu krisis pangan hebat dan ekstrem yang dijelaskan diatas,dalam hal ini, organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian terjun dan berupaya mengatasi krisis pangan ekstrim di Sudan. Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian di kancah internasional. FAO merupakan salah satu organisasi internasional di bidang pangan dan pertanian yang memiliki norma menerapkan ketahanan pangan dan pertanian di dunia.. FAO memiliki tujuan dan tugas untuk membantu negara yang bergabung untuk mencapai food security dan kesejahteraan pangan dan pertanian (Food Security Information Network 2020).

FAO melakukan implementasi sesuai dengan norma yang dimiliki yaitu mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas gizi,standar hidup dan pertanian masyarakat di dunia. FAO sudah terjun cukup lama dalam krisis pangan Sudan, akan tetapi peran FAO lebih meningkat ketika pandemi mulai memasuki Sudan. FAO terjun pada krisis pangan Sudan dengan tujuan ingin menjadikan Sudan lebih terstruktur dan tertata dalam bidang ketahanan pangan. FAO memiliki berbagai program implementasi ketahanan pangan dan pertanian yang

dilakukan untuk Sudan supaya krisis pangan bisa teratasi dengan baik sebagai wujud implementasinya menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional. Kehadiran FAO dihadirkan dengan berbagai program yang dilakukan untuk mengeluarkan Sudan dari lubang hitam krisis pangan yang membahayakan. FAO secara lebih aktif pada tahun 2020 hingga 2022 untuk Sudan karena pada tahun tersebut merupakan angka krisis pangan tertinggi Sudan hingga mulai menurunnya angka krisis pangan Sudan. Isu mengenai krisis pangan yang berujung pada kelaparan yang membahayakan keberlangsungan hidup manusia sudah menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dan diatasi karena hal tersebut menyangkut keberlangsungan hidup manusia (Ibushra 2020).

Tindakan mengatasi krisis pangan ini sebagai salah satu wadah untuk pembangunan berkelanjutan yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dan mengurangi angka kelaparan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang terpenting dalam aspek hidup manusia selain sandang, papan, serta kesehatan. Jika kebutuhan pangan tidak tercukupi, maka keberlangsungan hidup manusia terancam, karena menimbulkan masalah yang darurat dimana masyarakat akan kekurangan asupan pangan hingga dapat terjadi gizi buruk yang menyebabkan penyakit mudah menyerang imunitas manusia dan mengancam kehidupan manusia. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana peran FAO sebagai organisasi internasional melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian dalam mengatasi krisis pangan di Sudan pada tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi ketahanan pangan dan pertanian oleh FAO pada isu krisis di Sudan pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah mengenai krisis pangan di Sudan pada tahun 2020-2022, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui, bagaimana implementasi ketahanan pangan dan pertanian yang dilakukan oleh FAO di Sudan pada tahun 2020-2022.

1.4 Cakupan Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada tahun 2020 hingga 2022 dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun terburuk Sudan dalam menghadapi isu krisis pangan dan diperparah karena menyebarnya wabah COVID-19 dan bencana banjir bandang di Sudan. Covid-19 ini penyebab naiknya angka krisis pangan di Sudan, karena adanya covid-19 menyebabkan pemerintah Sudan memberlakukan pembatasan aktivitas, termasuk sector pertanian. Serta adanya bencana banjir bandang. Sehingga, menyebabkan terjadinya gagal panen dan penurunan produksi bahan makanan pokok Sudan, sehingga terjadi kelangkaan bahan makanan pokok yang menyebabkan adanya kenaikan harga bahan makanan pokok Sudan. Serta, pada tahun 2020 beberapa provinsi di wilayah Sudan mengalami banjir bandang sehingga menimbulkan kerusakan lahan pertanian Sudan yang menghambat proses produksi pangan Sudan. Dan rentan tahun 2021 merupakan tahun dimana FAO melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian di Sudan untuk membantu Sudan menangani isu krisis pangan yang ekstrem. Sementara pada 2022 merupakan tahun dimana program yang sudah dijalankan oleh FAO untuk mengatasi krisis pangan di Sudan sudah mulai berhasil dan terlihat bagaimana perkembangannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peran FAO dalam berkontribusi mengatasi isu krisis pangan di Sudan 2020-2022 merupakan sebuah elemen penting dalam penelitian ini, sehingga penting untuk membandingkan beberapa penelitian terdahulu lainnya yang membahas tentang FAO.

penelitian pertama terdahulu adalah karya Abdel Raouf Suleiman Bello and Eiman Musa Ahmed Fadul tahun 2021 dimana artikel jurnal penelitian tersebut membahas bagaimana peran FAO dalam mengatasi isu krisis pangan yang terjadi di Sudan pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan FAO dalam krisis pangan Sudan 2015 adalah yang dilakukan FAO berhasil meningkatkan pendapatan pangan dan keamanan pangan dengan sebuah program, salah satu program tersebut adalah perbaikan sumber ketersediaan air, dan dari program tersebut 76% dinilai cukup berhasil dan efektif dalam memperbaiki krisis pangan yang disebabkan karena kekeringan (Raouf 2021).

Senada dengan tulisan penelitian diatas, sebuah jurnal yang ditulis oleh (Romano 2021) yang berjudul, “ Peran FAO dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Program Pertanian dan Konservasi Pangan “ dalam jurnal artikel tersebut menjelaskan tentang krisis pangan yang dialami di NTT dan bagaimana peran FAO dalam mengatasi hal tersebut, pada artikel jurnal ini dijelaskan bahwa peran FAO terhadap krisis pangan di NTT sangat terkhusus dan sektor pertanian utama yang menjadi fokus turun tangan dan perbaikan FAO, beberapa hal yang FAO wujudkan dalam mengatasi krisis pangan di NTT adalah dengan mewujudkan sebuah program yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Program tersebut adalah pertanian konversi yang dibuat dengan atas dasar berubahnya iklim yang tidak menentu. FAO melakukan survei lapangan dan uji adaptasi lingkungan untuk melihat apakah cocok untuk menerapkan program pertanian konversi sebelum hal tersebut diresmikan dan hal tersebut dilakukan dengan bermitra kepada Kementerian Pertanian. Program pertanian konversi ini lebih menekankan dengan beberapa pertanian dengan sistem modern untuk bercocok tanam dengan menghasilkan kualitas pangan yang baik. Namun, akan tetapi program yang dijalankan oleh FAO tersebut sedikit kurang efektif karena banyak tantangan dari petani NTT yang kurang bisa menerima program penerapan pertanian konservasi dan lebih condong ke cara tradisional. Melihat hal tersebut ternyata FAO

melancarkan kembali dengan sebuah program baru yaitu memberlakukan SL-PK dan ternyata membuahkan hasil yang cukup menjanjikan, seperti meningkatnya jumlah ketahanan pangan dan produksi pangan meningkat karena program tersebut lebih condong dengan mempersiapkan dan menyediakan alat-alat pertanian, berbeda dengan program pertanian konversi yang hanya melakukan penyuluhan terkait sistem pertanian modern (Romano 2021).

Dalam journal yang ditulis oleh (Afifah Rizqy 2020) yang berjudul “ Peran FAO Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan sebagai Upaya Untuk Menangani Krisis Kelaparan di Sahel Tahun 2013-2015” dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa FAO cukup baik dalam menjalankan misinya dalam isu krisis pangan di Sahel, hal tersebut dapat dilihat dari perubahan yang cukup signifikan yang dilihat dari aspek kepemilikan aset, pemulihan mata pencaharian, peningkatan akses pangan dimana hal tersebut oleh FAO diwujudkan melalui pelaksanaan beberapa program dan aksi kemanusiaan. Salah satu Program yang dilaksanakan adalah FAO strategic Resilience Framework ,aksi Humanitarian Strategy, serta FAO melakukan beberapa kerjasama salah satunya bekerja sama dengan French Facility for Global Environment (FFEM), tidak hanya itu FAO juga berperan menjadi komunikator dalam pembuatan keputusan strategi untuk mengatasi krisis pangan. Dari apa yang telah FAO lakukan untuk Sahel salah satu wujud keberhasilannya juga dapat dilihat dari produksi gabah pada tahun 2015 di sahel meningkat 7,4% dari tahun sebelumnya. Kebutuhan dasar masyarakat Sahel juga dapat terpenuhi karena adanya keberhasilan sebuah program yang dipromosikan yaitu program “ Protection to Production” Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal tersebut, teori yang digunakan oleh penulis adalah “ realisme dan liberalisme” serta penulis juga mengaitkan dengan beberapa konsep hak asasi manusia serta keamanan manusia, teori yang digunakan penulis jurnal tersebut menjadi pembeda dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis skripsi ini (Rizqy 2020).

Tulisan ketiga dalam jurnal yang ditulis oleh (Gemala Asyura 2017) yang berjudul “ Peran WFP Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Yaman” dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa peran organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan dan ketahanan pangan adalah WFP, dimana dalam menangani isu krisis pangan tersebut WFP memfokuskan pada pemberian bantuan kemanusiaan seperti memberi bantuan komoditas pangan dukungan nutrisi melalui sebuah program pemberian kupon untuk 9,8 juta orang di WFP pada tahun 2018. Selain itu, WFP juga memberikan sebuah implementasi dukungan mata pencaharian dan sekolah intervensi pemberian makan yang bertujuan untuk kontribusi pemulihan dini masyarakat yang terkena dampak konflik.dalam jurnal tersebut penulis menggunakan perspektif pluralisme untuk menjawab rumusan masalah.Teori yang digunakan penulis jurnal tersebut menjadi pembeda dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis skripsi ini (Asyura 2017).

Tulisan lain yang membahas hal serupa oleh (Hariani 2015) yang berjudul “ Peran WFP Dalam Menangani Krisis Pangan di Sierra Leone Tahun 2009-2011” yang ditulis oleh “ Rani Hariani” dalam jurnal ini dibahas bahwa WFP memberlakukan beberapa program untuk mengatasi krisis pangan salah satunya adalah program PRRO (Program Protected Relief and Recovery Operation) yang difokuskan untuk meningkatkan akses pangan,perolehan sumber makanan,pelayanan sosial, membangun kembali mata pencaharian dan memperbaiki angka gizi buruk pada anak-anak dan ibu hamil. Akan tetapi, program tersebut tidak berjalan sepenuhnya efektif karena WFP sempat mendapatkan tentangan dari masyarakat karena WFP dianggap hanya ingin menguasai tambang berlian yang ada, dibalik memberikan bantuan untuk Sierra Leone (Hariani 2015).

Diharapkan literatur diatas dapat membantu untuk melengkapi penelitian yang sedang dilakukan. Dalam menjawab rumusan masalah penulis literatur diatas menggunakan analisa teori organisasi internasional dan teori pluralisme. Dan fokus literatur di atas meliputi aktor

negara lain selain Sudan serta tidak pada era covid-19. sehingga , penelitian penulis yang akan datang akan berfokus pada Sudan,era covid-19 dan bagaimana peran FAO menangani isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020 hingga 2022.

1.6. Kerangka pemikiran

Organisasi internasional merupakan aktor non-negara yang mana perannya meningkat sejak munculnya globalisasi pada perang dingin. Organisasi internasional juga memiliki teori pendekatan yang dapat diimplementasikan oleh organisasi internasional sesuai dengan pendekatan yang dimiliki. Salah satu pendekatan organisasi internasional adalah teori implementasi organisasi internasional menurut Joachim dibawah ini.

Tabel 1.6.1 Peta Konsep Teori Implementasi Organisasi Internasional Joachim

Approach	Enforcement	Managerial	Normative
Metode	- Sanksi, ekonomi atau militer, hukuman finansial,diperbolehkan	-Pengawasan berdasarkan pelaporan negara. -Peningkatan kapasitas & pemecahanmasalah - Bantuan keuangan atau teknis	- Otoritas dan Legitimasi - Melakukan pengendalian Informasi
Sifat	Memaksa	Terbuka dan Dapat Dikelola	Berdasarkan Kepercayaan

Sumber: (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008)

Enforcement Approach : implementasi program dan kepatuhan terhadap organisasi internasional dilakukan dengan pendekatan yang sifatnya memaksa. Memaksa ini dapat diwujudkan dengan pemberian hukuman yang dapat menekan negara untuk mematuhi peraturan atau perjanjian yang sudah dibuat (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008). Disini negara sebagai aktor yang realis yang mempertimbangkan cost and benefit yang akan didapatkan ketika perjanjian atau peraturan tersebut sudah diterapkan dan disetujui. Apabila dari perjanjian atau peraturan tersebut negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugiannya maka negara akan cenderung meratifikasi suatu perjanjian tersebut walaupun pada awalnya tidak ada keinginan untuk mengimplementasikan perjanjian atau peraturan tersebut (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

Maka dari itu supaya implementasi program dari organisasi internasional berjalan dengan lancar maka negara mendapatkan penekanan wajib menjalankan hukuman dan menerima sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi program, peraturan atau perjanjian yang sudah dibuat oleh organisasi internasional. Sanksi yang dapat diberikan oleh organisasi internasional dapat berupa sanksi ekonomi, sanksi militer yang dapat merugikan secara materil negara yang melakukan pelanggaran (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

Disisi lain, selain pemberian sanksi ekonomi, militer sanksi lain yang diberikan oleh organisasi internasional dapat berupa pemberian naming dan shaming yaitu sanksi sosial yang berwujud penyebarluasan kepada public terkait apa yang sudah dilanggar oleh negara terkait atau biasa disebut “dipermalukan” (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008). Dengan demikian, sanksi ini dapat menyebabkan citra negara yang melanggar rusak dan dikenal sebagai negara yang bebal dalam menaati peraturan yang ada. Kedua sanksi tersebut yaitu sanksi ekonomi atau militer, atau naming dan shaming sudah mampu memberikan sebuah

penekanan kepada negara agar untuk melakukan program, peraturan atau perjanjian yang sudah dibuat.

Kedua, implementasi juga dapat dilakukan dengan pendekatan *Managerial Approach* yang bersifat manajerial. Pendekatan ini tidak bersifat memaksa akan tetapi lebih ditekankan pada pendekatan yang bersifat terbuka (transparan), pemecahan masalah (solusi) dan pengembangan kapasitas negara (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008). Aktor organisasi internasional lebih menciptakan suasana yang kooperatif untuk mencari solusi dan dapat melalui analisis bersama dan konsultasi. Pendekatan ini menganggap bahwa aktor-aktor luar seperti organisasi internasional bahkan agensi yang terlibat pun memiliki peranan penting dalam pengimplementasian perjanjian internasional. Hal tersebut disebabkan oleh organisasi internasional juga dapat memberikan bantuan teknis untuk pembangunan kapasitas sumber daya manusia serta dapat memberi bantuan keuangan kepada negara anggota. Hal tersebut sebagai wujud pembuktian bahwa aspek pendekatan organisasi internasional ini bersifat terbuka (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

Selain itu, bentuk *Managerial Approach* juga dapat diwujudkan melalui metode monitoring atau pengawasan dengan tujuan untuk memantau perkembangan maupun menghindari pelanggaran terkait perjanjian, peraturan yang telah dibuat dan disepakati. Tindakan monitoring bisa dilakukan dengan beberapa hal seperti : pengawasan berupa kewajiban untuk membuat laporan yang bersifat regular oleh negara anggota terkait aktivitasnya dalam melakukan implementasi organisasi internasional (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008). Kedua, pembentukan badan pengawas khusus yang bertugas untuk mengawasi negara anggota. Ketiga, adanya pengiriman perwakilan organisasi internasional untuk datang ke negara anggota dan melakukan kegiatan pengawasan terkait kebijakan yang telah dibuat.

terakhir, adanya laporan yang selalu didapatkan dari aktor sosial atau dilakukan pengawasan secara mandiri (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

Ketiga, pendekatan normative yang dimaksud adalah organisasi internasional memiliki kepercayaan dari negara sebagai aktor yang penting dan memiliki sebuah otoritas. Otoritas yang dimaksud adalah, control terhadap informasi, yang membuat negara tidak mendapatkan informasi lebih patuh dan melalui kepercayaan terhadap organisasi internasional sebagai aktor yang berorientasi membantu yang lain. Serta, organisasi internasional memiliki otoritas legitimasi yang berasal dari dua sumber yaitu control terhadap informasi, yang membuat negara tidak mendapat informasi lebih patuh serta melalui kepercayaan terhadap organisasi internasional sebagai aktor yang imparisil, berorientasi dan rasional (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

Dalam penelitian ini, dari 3 parameter teori implementasi organisasi internasional Joachim penulis menggunakan 2 variabel teori yaitu *Managerial Approach* dan *Normative Approach*. Karena kedua variabel tersebut yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan FAO untuk membantu Sudan dalam menangani krisis pangan sebagai pelaksanaan visi misinya. Dimana dalam parameter teori *Managerial Approach* yang berisi monitoring, pemberian bantuan financial, teknisi serta pembangunan kapasitas dan penyelesaian masalah, hal tersebut yang dilakukan FAO dalam isu krisis pangan di Sudan. Serta parameter *Normative Approach* juga dilakukan oleh FAO pada isu krisis pangan di Sudan yaitu FAO menekankan otoritas legitimasi diiringi dengan control informasi. Serta dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan variable “*Enforcement Approach*” karena FAO tidak memiliki mekanisme pemberian sanksi kepada negara Sudan dalam isu krisis pangan 2020, maka dari itu hanya dua pendekatan yang digunakan.

1.7. Argumen Sementara

Sesuai dengan konsep implementasi peran organisasi internasional menurut Joachim, FAO berupaya mengatasi krisis pangan yang terjadi di Sudan pada tahun 2020-2022 yang melaksanakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam 2 variabel teori tersebut yaitu pendekatan : *Normative Approach* dan *Managerial Approach*. Hal yang dilakukan FAO dalam melaksanakan variabel *normative approach* adalah, FAO selalu membuat laporan pemantauan rutin terkait pelaksanaan program dan kebijakan yang dilakukan untuk Sudan. Sementara itu, *managerial approach* yang dilakukan oleh FAO adalah FAO bersifat terbuka dan transparan mengenai program yang dijalankan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan masyarakat Sudan bahkan pemerintah Sudan dalam menjalankan program tersebut, masyarakat Sudan juga mendapatkan akses penjelasan program yang dijalankan melalui pelatihan yang dilakukan oleh FAO. Hal managerial lain yang dilakukan FAO adalah dengan bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti WFP dan adanya upaya monitoring dan beberapa program seperti FNS REPRO, ACFASM untuk membantu Sudan dari krisis pangan yang berlanjut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dan mengamati sebuah data untuk menjelaskan secara deskriptif bagaimana peran FAO dalam menangani isu krisis pangan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah FAO sebagai Organisasi Internasional yang berupaya untuk menangani isu pangan di Sudan. Sementara itu, untuk objek penelitian ini adalah negara Sudan sebagai negara yang memiliki isu krisis pangan ekstrem pada tahun 2020-2022.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat sekunder sebagai rujukan. Penelitian ini memperoleh data dengan mengacu pada beberapa sumber diantaranya seperti Buku, Jurnal, Website resmi FAO WFP, E-book serta literatur berita yang kredibilitasnya dapat dipercaya.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan empat langkah riset yang meliputi pra-riset, pengambilan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Pra riset yaitu sebagai persiapan riset dengan melihat berbagai macam bacaan dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Kedua, pengambilan data dari hasil pra-riset tadi akan dicatat dan dipilah. Selanjutnya, akan dilakukan analisis data dari data yang sudah didapatkan yang mana akan dimasukkan dalam pembahasan serta referensi yang sesuai dengan sub bahasannya sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dan dapat ditarik sebuah kesimpulan di akhir penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan : bab ini menjabarkan mengenai latar belakang dari isu masalah penelitian yang diangkat yaitu kehadiran FAO dalam menangani isu krisis pangan di Sudan, pada Bab 1 juga akan membahas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab 2 Konteks : bab ini membahas tentang bagaimana kondisi dinamika Sudan saat terjadi krisis pangan, serta akan menjabarkan bagaimana respon dan upaya pemerintah Sudan dalam menangani isu krisis pangan di Sudan.

Bab 3 Pembahasan : bab pembahasan terakhir akan menjelaskan tentang bagaimana analisis FAO dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian pada isu krisis

pangan di Sudan menggunakan pengaplikasian teori dan uraian analisis terkait studi kasus akan dibahas pada bab ini.

BAB 4 : pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan poin penting jawaban dari rumusan masalah serta menjadi bagian akhir penelitian.

BAB 2

KRISIS PANGAN DI SUDAN DAN KEGAGALAN PEMERINTAH SUDAN DALAM MENGATASINYA

Krisis pangan merupakan sebuah fenomena yang tidak luput mewarnai kehidupan masyarakat di Sudan. Selain memiliki iklim yang kering karena Sudan merupakan negara kawasan Afrika, Sudan juga merupakan negara yang memiliki konflik saudara yang berkepanjangan. Sehingga, hal tersebut memperparah keadaan krisis pangan di Sudan karena konflik di Sudan masih sering kali memanas selain disebabkan karena faktor iklim. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022, krisis pangan di Sudan mengalami angka kenaikan drastis karena adanya wabah covid-19 dan bencana alam banjir bandang di Sudan.

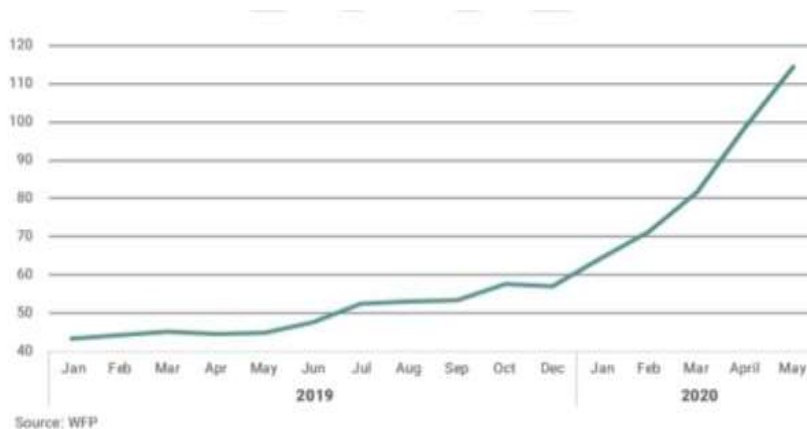
Bab 2 dalam tulisan ini membahas tentang kondisi krisis pangan dan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan. Bab ini sangat diperlukan guna sebagai dasar dalam menganalisis bagaimana FAO melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian sebagai organisasi internasional dalam menangani krisis pangan di Sudan. Serta pada bab 2 akan menjadi penghubung pembahasan mengenai kebijakan dalam menangani krisis tersebut. Secara spesifik pada bab 2 akan membahas mengenai faktor apa saja yang mendorong adanya krisis pangan di Sudan dan langkah yang telah diambil oleh pemerintah Sudan dalam menangani krisis yang gagal sehingga membuat FAO harus terjun untuk membantu dalam mengatasi krisis pangan di Sudan.

2.1. Kondisi krisis pangan di Sudan pada tahun 2020-2022

Sudan merupakan negara yang identic dengan krisis pangan sejak tahun 1956 karena adanya perang saudara, dan isu krisis pangan di Sudan merupakan isu berkepanjangan yang mewarnai kehidupan masyarakat Sudan. Akan tetapi, Tahun 2020 merupakan tahun terburuk

Sudan mengalami krisis pangan, hal tersebut disebabkan karena penyebaran wabah covid-19 dan bencana alam banjir bandang di Sudan (Abtala 2021).

Gambar 2.3.1 Grafik Kenaikan Kasus Krisis Pangan Sudan dari 2019 ke 2020



Sumber: (World Food Programme Network 2020)

Menurut grafik diatas yang diterbitkan oleh WFP menjelaskan bahwa kondisi krisis pangan Sudan dari bulan Januari 2019 hingga Mei 2020 sudah berbeda sangat jauh kenaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2020 merupakan tahun darurat mengalami isu krisis pangan. Menurut analisis klasifikasi fase ketahanan pangan terpadu (IPC) pada bulan Juli 2020, sekitar 9,6 juta orang menghadapi kerawanan pangan tinggi yang pernah dicatat oleh IPC dalam sejarah di Sudan, terhitung sejak Juni 2020 hingga September 2020 (Food and Agriculture Organizations of the United Nations 2020).

Pada tahun 2020 Sudan, di bulan Ramadhan masyarakat muslim Sudan hanya bisa berbuka puasa dengan air karena pasokan makanan yang tidak memadai. Hal tersebut dikarenakan pandemic covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas pertanian yang menyebabkan pertanian makanan pokok Sudan seperti gandum, millet, sorghum kurang diperhatikan sehingga menyebabkan adanya gagal panen sumber makanan pokok masyarakat Sudan. Gagal panen tersebut menyebabkan kelangkaan

bahan makanan pokok dan penurunan produksi sehingga menyebabkan lonjakan harga makanan pokok seperti gandum, sorghum dan millet (Abishkar 2021).

Selain itu, adanya goncangan iklim yang menyebabkan banjir bandang di bulan Juni 2020 juga tidak luput menjadi boomerang bagi Sudan. Karena, banjir bandang di Sudan semakin memperburuk situasi yang mana sebagian besar wilayah Sudan mengalami kerusakan besar infrastruktur dan terutama lahan pertanian sumber makanan pokok masyarakat Sudan lahan pertanian masyarakat Sudan yang merupakan sumber pangan pokok rusak akibat banjir bandang, kerusakan inilah yang menyebabkan masyarakat Sudan tidak mampu memproduksi bahan pangan pokok, yang menimbulkan kelangkaan pangan sehingga menyebabkan harga pangan mengalami kenaikan. Mengingat Sudan bukan merupakan negara yang memiliki ekonomi yang baik, adanya kenaikan bahan makanan pokok (gandum, sorghum, millet) membuat masyarakat Sudan tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan, akibatnya angka kelaparan dan gizi buruk di Sudan meningkat tinggi pada tahun 2020. Keadaan tersebut membuat Pemerintah Sudan mengumumkan keadaan darurat pangan nasional pada tahun 2020 (Global Network Against Food Crises 2020).

Kelangkaan pangan di Sudan pada tahun 2020 merupakan pemicu utama krisis pangan darurat Sudan. Adanya covid-19 menyebabkan tindakan pembatasan aktivitas masyarakat guna mengurangi penyebaran wabah menyebabkan berkurangnya ketersediaan input pertanian, terutama benih tanaman bahan makanan pokok. Hal tersebut juga disebabkan karena gangguan perdagangan yang menjadikan aktivitas pekerjaan di sektor pertanian menjadi berkurang dan menurunkan daya beli rumah tangga. FEWS NET melaporkan bahwa pasar input pertanian di berbagai kota di Sudan juga ditutup, penutupan pasar input pertanian tersebut terjadi di Darfur Timur, Gadarif, Gezira, Kassala, Sinar, Kordofan, dan Nil (Abtala 2021)

Selain itu, pembatasan juga menghambat akses terhadap tenaga kerja sehingga menyebabkan peningkatan kekurangan tenaga kerja dan upah selama masa panen. Hal ini yang menyebabkan biaya panen yang lebih besar, tertundanya panen dan terjadinya kerugian sebelum panen. Kerugian tersebut yang menyebabkan harga komoditas pangan melonjak dan menimbulkan kurangnya daya pasokan pangan yang memadai. Dicatat oleh WFP bahwa biaya pangan di Sudan sejak April 2020 sudah meningkat sebanyak 146% daripada 2019, bahkan makanan pokok produksi lokal pun melonjak menjadi 75%, sehingga hal tersebut menyebabkan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022).

Tabel 2.3.1 Penurunan Produksi Bahan Makanan Pokok Sudan

Bahan Makanan Pokok	Persentase Penurunan Produksi 2020
Sereal	20%
Millet	60%
Sorgum	48%
Wijeng, Kacang-kacangan	20%

Menurut data ICRC, pada bulan Juli 2020 harga biji-biji makanan pokok di Sudan meningkat karena panen sereal yang buruk dan kualitasnya menurun. Penurunan sereal ini diperkirakan hingga 20% daripada tahun sebelumnya. Tidak hanya sereal, penurunan millet juga terjadi secara drastis sebanyak 60% lebih tinggi sebanyak 15% daripada tahun sebelumnya. tercatat pula bahwa produksi sorgum menurun sebanyak 48% dibandingkan tahun sebelumnya (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022). Sebagian besar

wilayah Sudan mengalami hal tersebut yang meliputi daerah Nil Putih, Kordofan Barat dan El-Gadarif yang merupakan daerah terparah. produksi wijen dan kacang juga tidak luput mengalami penurunan mencapai 20% daripada tahun sebelumnya (Hsiao 2020,17-19).

Penurunan produksi tersebut menyebabkan kelangkaan bahan makanan pokok sehingga harga pangan mengalami kenaikan yang menyebabkan masyarakat Sudan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Peningkatan harga ini terjadi hingga bulan agustus 2020 karena terbatasnya pasokan dalam negeri, melemahnya mata uang dan langkah pengendalian pandemic, yang mana berdampak negatif pada rantai pasokan (Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Food Programme 2022, 9-13).

Harga pangan yang terbatas ini yang menjadikan harga komoditas semakin melonjak dan menimbulkan kurangnya daya pasokan yang memadai. Hal ini juga dicatat oleh WFP bahwa biaya pangan di Sudan sejak April 2020 sudah meningkat sebanyak 56% daripada 2019, bahkan harga makanan pokok produksi lokal pun melonjak menjadi 75%, sehingga hal tersebut menyebabkan rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan (Food and Agriculture Organizations of the United Nations 2020,15-19). Wakil kepala kantor koordinasi kemanusiaan PBB untuk Sudan Tinago Chikoto mengatakan bahwa, lebih dari 9,6 juta warga Sudan atau hampir $\frac{1}{4}$ dari total populasi mengantri berjam-jam untuk membeli makanan dan merupakan angka tertinggi dalam kelaparan yang hebat (Cheeren 2020)

Gambar 2.3.2 Peta Penurunan Hasil Pangan di Berbagai Wilayah Sudan

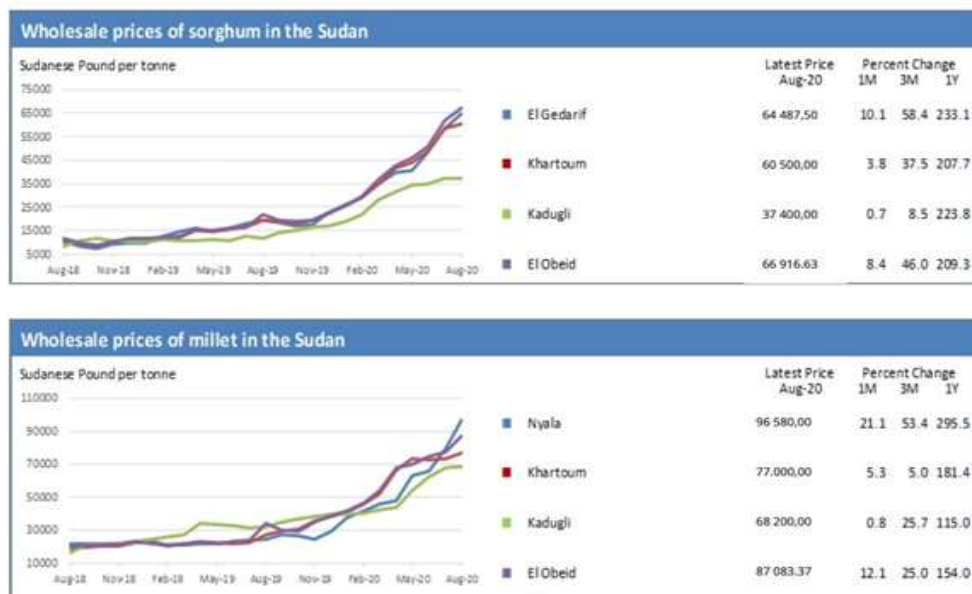


Sumber: (Food Security Information Network 2020)

Di berbagai provinsi wilayah Sudan yang terkena dampak besar seperti Unity, Gazzal Warrap, merupakan provinsi dengan kondisi yang paling memprihatinkan ditandai dengan warna merah semu hitam yang mana kondisi penurunan produksi pangan mencapai >60-80%. Sembilan puluh delapan persen rumah tangga yang diwawancarai bergantung pada pertanian tadah hujan. Tanaman utama yang dibudidayakan pada musim pertanian sebelumnya antara lain sorgum (53 persen), kacang tanah (20 persen) dan jagung (17 persen). Dua pertiga rumah tangga yang bercocok tanam memiliki luas sekitar setengah hektar hingga lebih dari 1 hektar tersedia untuk budidaya (lebih dari 66 persen), sementara petani lainnya memiliki lahan kurang dari setengah hektar (2 persen). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas tanah yang ditanami menurun bagi 44 persen petani yang diwawancarai. Sekitar 83 persen rumah tangga petani mengindikasikan bahwa mereka mengalami kesulitan produksi tanaman, kehilangan dan kerusakan tanaman (53 persen), kualitas benih yang buruk (28 persen), kekurangan air atau irigasi untuk pertanian (23 persen), kurangnya akses terhadap tenaga kerja (14 persen) dan kekurangan benih (13 persen) (Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Food Programme 2022).

Sekitar 46 persen petani bergantung pada pasar untuk membeli benih, 68 persen terutama bergantung pada produksi mereka sendiri dan menyimpan sebagian hasil panen mereka untuk ditanam pada musim berikutnya, dan 13 persen bergantung pada distribusi benih gratis dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Karena tantangan pertanian yang disebutkan oleh para petani yang disurvei dibandingkan dengan tahun normal, 48 persen rumah tangga yang melakukan pertanian melaporkan adanya penurunan hasil panen, dan 19 persen tidak menunjukkan adanya perubahan dalam hasil panen dari rumah tangga petani yang terlibat dalam penjualan hasil panen (Kusters 2022)

Gambar 2.3.3 Grafik Kenaikan Harga Sorgum dan Millet



Sumber: (Food Security Information Network 2020)

Menurut grafik Analisis harga dan Pemantauan Pangan FAO diatas dijelaskan bahwa periode Agustus 2020 di Sudan dianalisis bahwa harga bahan makanan pokok sorgum dan millet mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan pula karena lemahnya mata uang,kekurangan bahan bakar,tingginya bahan baku pertanian,meningkatnya biaya produksi dan transportasi, tekanan tambahan pada harga biji-bijian sering terjadi karena

gangguan pasar dan perdagangan akibat tindakan pengendalian COVID-19 (Global Network Against Food Crises 2020).

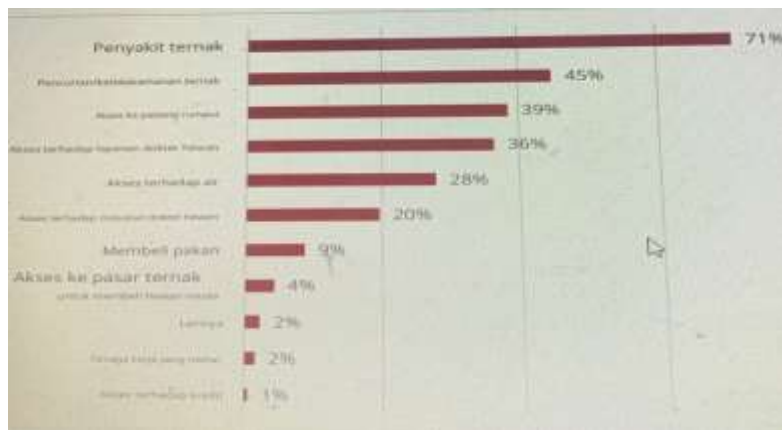
Tabel 2.3.2 Kenaikan Harga Pangan Hewani

Bahan Pangan Hewani	Kenaikan Harga 2019-2020
Kambing,Domba	15% menjadi 35%
Unta	10% menjadi 23%

Selain pertanian,kebutuhan pangan pokok Sudan juga bergantung pada produksi bahan pangan dari ternak seperti kambing,dan unta. Tabel diatas adalah data ICRC, sejak Januari 2020 hingga Februari, angka kenaikan harga pada hewani mencapai 15% daripada tahun sebelumnya (Food and Agriculture Organizations of the United nations, 2021). Menurut FEWS NET, harga kambing meningkat sebesar 15%-35%,yaitu 4-6 kali diatas rata-rata lima tahun di sebagian besar pasar. Menurut laporan FAO, ekspor ternak juga mengalami penurunan dimana ekspor domba dan unta menurun sebesar 23 % di bulan Juli 2020 (Hsiao 2020).

Penurunan produksi bahan pangan hewani dari hewan ternak disebabkan karena kurangnya padang rumput dimana curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir bandang di sepanjang 2020 serta erbatasnya pergerakan ternak karena tindakan pengendalian COVID-19,dan adanya penyakit ternak ymana penyakit ternak ini disebabkan karena ternak tidak mendapatkan akses pakan seperti rerumputan. Serta, diikuti oleh kurangnya layanan kesehatan hewan,konflik ketidakamanan dan terbatasnya akses air membuat ternak kelaparan dan terkena penyakit sehingga banyak ternak di Sudan seperti domba dan unta yang mati dan menyebabkan adanya penurunan produksi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang sangat tinggi (Jaspars 2020).

Gambar 2.3.4 Kesulitan Utama Produksi Ternak



Sumber: (Food Security Information Network 2020)

Berdasarkan survei, ternak utama yang dipelihara oleh rumah tangga adalah sapi, kambing, unta dan domba. Sekitar 43 persen rumah tangga melaporkan kesulitan produksi ternak yang mencakup hama dan penyakit ternak (71 persen rumah tangga), pencurian dan ketidakamanan (45 persen), kurangnya akses terhadap padang rumput (39 persen), kurangnya layanan kesehatan hewan (36 persen), kurangnya akses terhadap air (28 persen), kurangnya sarana peternakan (20 persen) dan tingginya harga pakan (9 persen) (Gambar 5). Hampir seluruh rumah tangga (98 persen) bergantung pada padang rumput untuk produksi ternak dan hanya sedikit yang melakukan pembelian pakan (2 persen) (FAO,2021).

Gambar 2.3.5. Peta Daerah Sudan dengan Kondisi Terburuk Akibat Krisis Pangan 2020-2021



Sumber: (Food Security Information Network 2020)

Dari 6 persen rumah tangga yang tidak bertani atau beternak hewan, beberapa diantaranya melakukan penangkapan ikan di danau dan sungai (82 persen), terutama di Sungai Nil Putih, Unity dan Jonglei dimana pada peta daerah dilaporkan dengan warna merah yang cenderung hitam menandakan kondisi yang memprihatinkan dimana presentasi penurunan produksi pangan hewani mencapai >80-100%. Sebagian besar rumah tangga nelayan melaporkan penurunan produksi ikan (55 persen) selama tiga bulan sebelum survei, yang menurut responden disebabkan oleh kurangnya sarana penangkapan ikan (63 persen), kesulitan menemukan ikan (60 persen), kesulitan mengakses tenaga kerja (11 persen) dan tantangan akses bahan bakar (7 persen). Bahan-bahan penangkapan ikan yang dilaporkan sulit diakses oleh nelayan adalah jaring ikan (97 persen), peralatan (44 persen), reparasi perahu (36 persen), umpan (15 persen) dan es untuk pengawetan ikan (13 persen).

Pada tahun 2021, kondisi pangan di Sudan tidak jauh berbeda pada tahun 2020, dan dikatakan sedikit lebih memburuk dan tidak ada perkembangan. kegagalan panen yang menyebabkan krisis ekonomi makro tidak stabil yang membuat ketidakamanan sipil yang terus

menerus memburuk ditambah adanya pembatasan yang sangat menyulitkan. Pada tahun 2021, tercatat bahwa 8,9 masyarakat Sudan berada dalam kerawanan ketahanan pangan yang terhitung mulai dari bulan April hingga Mei (Brockman 2022).

Daerah yang paling terdampak akan hal tersebut adalah Dafur Utara dan daerah Laut Merah. pada tahun 2021 ini pasokan pangan sangat memprihatinkan yaitu hanya dapat dari sisa persediaan pada tahun 2020 silam asupan sorgum,sereal millet mengalami kelangkaan yang begitu akut,daya beli rumah tangga yang sangat terbatas. Permasalahan kemanusiaan ini mendorong pemerintah Sudan pula untuk tidak luput berandil dengan misi untuk menstabilkan keadaan di Sudan terutama bidang krisis pangan. Sehingga pemerintah mengambil tindakan pencegahan,penanganan untuk peningkatan pasokan pangan di tengah wabah covid-19 (Global Network Against Food Crises 2020, 14).

2.2. Ketidakmampuan Peran Pemerintah Sudan dalam Mengatasi Permasalahan Krisis Pangan 2020.

Salah satu faktor krisis pangan ekstrem di Sudan pada tahun 2020 adalah karena adanya penyebaran covid-19. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Sudan untuk menjaga keamanan dan bertugas untuk mencukupi kebutuhan suatu negara. Pemerintah Sudan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani krisis pangan yang ekstrem pada tahun 2020. Pada pertengahan Juni 2020,pemerintah Sudan memberikan izin khusus bagi para petani untuk melakukan aktivitas pertanian supaya dapat memproduksi bahan makanan pokok Sudan yaitu gandum,sorgum,millet sereal (Kusters 2022). Sementara itu, pada bulan Agustus sampai Oktober aktivitas pertanian dihentikan dikarenakan penurunan sangat drastis akibat banyak petani terinfeksi covid-19. Sementara itu, strategi pemerintah disaat gandum,millet sorghum sebagai makanan pokok mengalami penurunan adalah pencadangan kacang dan wijen sebagai pengganti gandum,sorgum dan millet yang mengalami penurunan drastis sejak awal tahun. Hal

tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai ketersediaan gandum lokal untuk produksi dalam negeri (Elke 2021).

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembelian sorgum dan gandum dengan jumlah yang besar sebagai pendistribusian pangan dan penurunan harga sereal. Selain menangani pada sektor pangan, pemerintah juga melakukan perencanaan anggaran fisik 2020 dengan tujuan untuk mengatasi pengurangan subsidi pengangguran, hal tersebut dilakukan dengan melalui program QUBI (*Quasi Universal Basic Income*) dan berjalan pada September 2020. Program QUBI ini memberikan uang tunai sebanyak 30 dollar US, yang dibagikan kepada 1 kepala rumah tangga. Sehingga adanya program QUBI ini, masyarakat diharapkan mampu membeli berbagai makanan pokok, obat-obatan. Transisi baru juga dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah mulai melakukan pengeksportan biji minyak, gum arab dan kapas dengan tujuan untuk memperkuat sistem pangan yang semakin buruk karena adanya pandemi covid-19 (Kenvi 2022)

Akan tetapi, tidak sepenuhnya peran pemerintah Sudan dapat mengatasi krisis pangan tersebut berhasil terutama program QUBI yang dijalankan pemerintah Sudan. Karena, anggaran biaya Sudan sangat terbatas terlebih lagi Sudan bukan merupakan negara yang memiliki ekonomi yang tinggi. Keadaan krisis pangan yang sangat memprihatinkan yang diperburuk adanya bencana banjir bandang, konflik saudara, menyebabkan sebuah tekanan pada bidang kemanusiaan khususnya sektor pangan. Pemerintah Sudan sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi belum sepenuhnya memadai, sehingga pemerintah harus meminta bantuan kepada organisasi internasional, yaitu FAO dimana merupakan organisasi internasional bidang pangan dan pertanian yang bertugas untuk meningkatkan kualitas gizi dan standar hidup masyarakat (Global Network Against Food Crises 2020, 6-9).

Melihat buruknya keadaan krisis pangan Sudan, ketidaksanggupan pemerintah Sudan dalam menanggulangi krisis pangan secara efektif yang ditandai dengan tidak adanya perubahan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Sudan, maka organisasi internasional bidang pangan dan pertanian naungan PBB, yaitu FAO yang memiliki misi meningkatkan gizi, standar hidup melalui peningkatan produksi, distribusi pertanian. Ketahanan pangan yang semakin terancam karena wabah COVID-19 membuat pemerintah Sudan yaitu FAO turun tangan untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan melalui program kemanusiaan untuk memulihkan ketahanan pangan yang memadai.

2.3. Masuknya FAO untuk membantu Sudan

Sebagai organisasi internasional pasti memiliki sebuah norma dan visi misi tersendiri. Salah satunya adalah FAO, sebagai organisasi internasional bidang pangan dan pertanian. Dalam teori implementasi organisasi internasional menurut Joachim organisasi internasional melakukan sebuah penyelesaian masalah pada sebuah permasalahan yang muncul. Hal tersebut seperti yang dilakukan FAO dalam membantu Sudan mengatasi isu krisis pangan ekstrem pada tahun 2020-2022. Sebagai organisasi internasional bidang pangan dan pertanian sudah menjadi kewajiban FAO membantu Sudan mengatasi isu krisis pangan di Sudan dan menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi.

Sebagai organisasi internasional, FAO mengimplementasikan ketahanan pangan dan pertanian melalui krisis pangan yang terjadi di Sudan untuk mewujudkan sebuah ketahanan pertanian, pangan sehingga terciptanya sebuah keadaan dimana dunia bebas dari gizi buruk dan mendapatkan akses pangan yang baik sesuai dengan visi misi dan norma yang dimiliki oleh FAO. Dalam isu krisis pangan ekstrem di Sudan tahun 2020-2022 FAO menjalankan implementasi ketahanan pangan dan pertanian sebagai organisasi internasional (Nasution 2022).

2.3.1 Sejarah masuknya FAO untuk Membantu Sudan

FAO sebagai organisasi internasional dalam bidang pertanian dan pangan yang memiliki visi misi menerapkan ketahanan pangan dan pertanian sehingga tidak adanya gizi buruk di Dunia. Dalam isu krisis pangan di Sudan, sebenarnya FAO sudah beberapa kali melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian salah satunya mengatasi isu krisis pangan di Sudan, terlebih lagi krisis pangan merupakan isu yang tidak luput mewarnai kehidupan masyarakat Sudan sejak dulu. Akan tetapi di tahun 2020, implementasi yang dilakukan FAO lebih meningkat karena isu krisis pangan di Sudan sangat darurat. Masuknya FAO dalam menangani krisis pangan di Sudan ini diawali dengan Lembaga swadaya masyarakat Sudan, yaitu NESI (News Sudanese Indigenous NGO's South Sudan).

NESI ini memiliki tujuan menyampaikan pada dunia luar bahwa krisis pangan di Sudan pada tahun 2020 tersebut merupakan sebuah keadaan yang serius. NESI melakukan upaya kolektif yaitu membuat permohonan konsolidasi Sudan-LSM sebagai bentuk seruan pada PBB untuk menyampaikan krisis kemanusiaan yang sedang melanda. NESI (News Sudanese Indigenous NGO's South Sudan) bersama pemerintah Sudan menyuarakan keadaan krisis pangan darurat yang ekstrem di Sudan melalui seruan laporannya pada PBB pada bulan Mei 2020 (Humanitarian Affairs 2021). Yang mana akhirnya sebagai organisasi internasional naungan PBB dan sesuai dengan visi misi dan norma yang dimiliki oleh FAO, FAO menjalankan kembali visi misinya untuk melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian untuk menangani isu krisis pangan di Sudan yang ekstrem dimulai pada Mei 2020 FAO mulai aktif kembali melakukan beberapa program dan aktivitas untuk menerapkan implementasi ketahanan pangan dan pertanian di Sudan (Malik 2022).

Dalam terjun melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian dalam isu krisis pangan yang ekstrem di Sudan pada tahun 2020, tidak hanya berdasarkan kondisi krisis pangan

yang ekstrem dan darurat akan tetapi hal tersebut dikarenakan FAO juga memiliki sebuah mandate norma. Dimana norma yang dimiliki oleh FAO adalah untuk menerapkan ketahanan pangan dan ketahanan pertanian di dunia sehingga dunia bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh FAO. Melihat kondisi krisis pangan di Sudan yang memprihatinkan, sebagai organisasi internasional bidang pangan dan pertanian, FAO masuk ke negara Sudan untuk membantu Sudan keluar dari permasalahan pangan darurat, sesuai dengan norma yang dimiliki oleh FAO.

2.3.2 Aktor-aktor lain yang terlibat dalam membantu FAO

FAO dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian untuk mengatasi krisis pangan di Sudan juga mengadakan kerja sama dengan beberapa aktor nasional maupun aktor internasional. Pengadaan kerjasama atau mitra yang dilakukan oleh FAO juga merupakan bagian dari upaya organisasi internasional dalam menerapkan kebijakan dan nilainya di ranah domestik yang berfokus pada penekanan dan pengelolaan. Kerja sama dengan berbagai aktor yang terlibat dalam mengatasi isu krisis pangan di Sudan juga sebagai bentuk upaya penerapan teori implementasi organisasi internasional khususnya adalah point *Managerial Approach* yang merupakan salah satu parameter dalam teori implementasi organisasi internasional (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

FAO melakukan kerja sama ini juga sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan permasalahan isu krisis pangan di Sudan. Dimana krisis pangan di Sudan 2020 adalah krisis yang ekstrem akibat banjir bandang dan penyebaran covid-19 yang menyebabkan berbagai macam permasalahan dalam pemenuhan pangan pokok dan pangan hewani. Maka dari itu, FAO membutuhkan aktor lain untuk membantu berperan menangani isu krisis pangan ekstrem di Sudan lewat program dan berbagai agenda yang FAO lakukan untuk krisis pangan ekstrem di Sudan. Adanya kerja sama ini merupakan kebijakan atau nilai yang FAO dapat lakukan secara

lebih efektif ditambah dengan adanya aktor lain yang memiliki kemampuan serta keahlian dalam bidangnya untuk mengatasi isu krisis pangan, sehingga implementasi yang dilakukan oleh FAO sebagai organisasi internasional pun dapat terlaksana dengan baik. Lebih dalam lagi, upaya FAO dalam mengatasi krisis pangan di Sudan tahun 2020-2022 dilakukan dengan melalui kerjasama dengan berbagai pihak berikut.

Pertama, FAO menjalin kerja sama dengan kementerian pertanian dalam melaksanakan monitoring, survey terkait bagaimana kondisi krisis pangan di Sudan, dan bagaimana kondisi tanaman pangan dan panen di Sudan terkhusus dalam program ACFASM. Dan dalam program ini Uni Eropa membantu dalam pendanaan, serta dalam program ini Uni Eropa membantu dalam perumusan data IPC yang merupakan laporan terupdate kondisi krisis pangan di Sudan, yang mana hasil perumusan data IPC tersebut merupakan aspek terpenting bagi FAO dalam pengambilan keputusan mengenai ketahanan pangan di Sudan (Food and Agriculture Organizations of the United Nations and World Food Programme 2022, 14-18).

Keterlibatan kementerian pertanian dalam program ACFASM cukup dominan dimana kementerian pertanian dipilih oleh FAO dan dibentuk tim besar surveyor yang dilatih untuk menganalisis dan membantu memfasilitasi masyarakat Sudan dalam hal pelatihan. Tim besar dari kementerian pertanian tersebut bertugas untuk membantu dalam mengumpulkan data dan memberi pelatihan kecil kepada masyarakat Sudan khususnya kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai petani. Pelatihan tersebut merupakan pelatihan praktis secara langsung dimana sebelumnya FAO dibantu oleh kementerian pertanian untuk membentuk buku modul yang mana ditujukan untuk dibagikan kepada masyarakat Sudan saat pelatihan dilakukan pelatihan yang diberikan oleh FAO dan kementerian pertanian ini merupakan pelatihan praktis yang sifatnya langsung sehingga peserta pelatihan dapat secara mandiri meniru teknik dan mempelajari untuk bagaimana nilai pasokan pangan di daerah mereka. FAO bekerja sama dengan mitra di bidang Ketahanan Pangan dan Mata Pencaharian (Saed 2021).

Kedua, Dewan Direktur Eksekutif Grup Bank Dunia (WBG) juga turut membantu Sudan dimana adanya pengesahan Country Engagement Note (CEN) baru pada tanggal 8 Oktober 2020, yang mana bertujuan untuk mendukung pemerintah Sudan dalam mereformasi perekonomian yang anjlok akibat krisis pangan yang terjadi di Sudan. Dari CEN tersebut menghasilkan konferensi Berlin pada November 2020 yang membahas sebuah penyeruan kepada negara-negara di dunia untuk membantu donasi terkait isu krisis pangan di Sudan 2020 (World Bank Global 2023).

Dewan Direktur Eksekutif Grup Bank Dunia (WBG) juga mengadakan sebuah konferensi kecil di Berlin pada bulan Juni dimana konferensi tersebut merupakan sebuah bantuan mitigasi dampak kemanusiaan, pembangunan dan sosial, dukungan transisi dan pemulihan Sudan. Hal ini dirancang untuk meningkatkan kontribusi donor untuk membiayai program bantuan tunai program dukungan keluarga Sudan. Sudan menerima sekitar \$523 juta dari berbagai negara yang tergabung dalam konferensi tersebut sebagai sebuah kesepakatan dari konferensi Berlin untuk mengatasi resiko keamanan pangan. Hal tersebut dapat beroperasi karena tidak luput dari kontribusi keuangan dari berbagai negara yaitu Uni Eropa, Perancis, Finlandia, Irlandia, Italia, Arab, Belanda, Swedia, Inggris, Norwegia, Spanyol. Bank Dunia mendorong kolaborasi dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. di Sudan, bank Dunia secara aktif terlibat dengan para pelaku pembangunan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang pada masyarakat lokal di Sudan (World Bank Global 2023).

Ketiga, aktor internasional yang turut berkontribusi dalam membantu Sudan bebas dari krisis pangan adalah WFP. Dimana WFP membuat sebuah program kecil terkait kemanusiaan, yaitu Proyek Jaring Pengaman Darurat Sudan Proyek senilai \$100 juta yang dilaksanakan oleh WFP bertujuan untuk memberikan bantuan tunai dan dukungan makanan kepada rumah tangga yang rawan pangan di wilayah tertentu di Sudan. Sejak dimulainya pada bulan Oktober 2020

hingga September 2021 proyek ini telah memberikan bantuan sosial melalui distribusi makanan dalam bentuk natura dan bantuan tunai kepada 2,143,366 orang yang paling rawan pangan di 12 negara bagian, melebihi target 2 juta orang. Proyek ini menjangkau 1.984.759 penerima manfaat melalui bantuan tunai dan 158.607 penerima manfaat melalui distribusi makanan dalam bentuk natura. Setelah konflik terjadi pada bulan April 2023, sisa dana digunakan kembali untuk mendukung populasi pengungsi internal dan komunitas tuan rumah mereka, yang pada akhirnya membantu hampir 350.000 penerima manfaat (WFP 2021)

Keempat, dalam melakukan monitoring pengawasan FAO juga bekerja sama dengan aktor lain di Sudan yaitu dalam melakukan monitoring dibantu LSM Sudan yaitu NESI (News Sudanese Indigenous NGO's Sudan). NESI bersama dengan FAO melakukan monitoring terkait apa yang menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh Sudan dalam krisis pangan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Monitoring FAO bersama NESI ini berlangsung selama 2021, dari hasil monitoring terkait apa yang dibutuhkan Sudan dalam menangani krisis pangan yang dilakukan FAO bersama NESI, adalah hasil terkait bagaimana kondisi masyarakat Sudan saat krisis pangan di 2020 sehingga dari kondisi tersebut dapat mengetahui apa saja hal terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat Sudan selama krisis pangan. Sehingga FAO dapat mengambil langkah dan bergerak memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sudan (Malik 2022)

Hal ini sejalan dengan bagaimana konsep implementasi organisasi internasional menggunakan pendekatan managerial melalui kerja sama dengan aktor lain. Dalam hal ini, kerja sama dengan berbagai aktor yang dijalin oleh FAO memiliki tujuan untuk meningkatkan aset pertanian dan pangan masyarakat dan membantu Sudan dalam mengakhiri krisis pangan di Sudan dengan meningkatkan kapabilitas masyarakat dan adanya akses pangan yang memadai.

BAB 3

IMPLEMENTASI KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN OLEH FAO DI SUDAN 2020-2022

Bab 3 dalam tulisan ini membahas tentang bagaimana FAO mengimplementasikan ketahanan pangan dan pertanian dalam program-program khusus FAO untuk Sudan, dalam mengatasi krisis pangan di Sudan menggunakan konsep implementasi organisasi internasional di ranah domestik. Bab ini dibuat untuk menganalisis lebih dalam bagaimana FAO melakukan implementasi sebagai organisasi internasional dalam mengatasi krisis pangan di Sudan pada tahun 2020 hingga 2022. Pada bab ini menjadi bagian utama dari penelitian yang penulis susun dan menjadi bagian yang paling membedakan dengan penelitian terdahulu.

Sehingga, pada bab 3 ini penulis akan lebih dalam menjelaskan bagaimana FAO menjalankan implementasi ketahanan pangan dan pertanian melalui programnya dengan variabel dari perspektif managerial dan normatif, melalui kerja sama dengan aktor lain yang memiliki visi misi yang sama, memberikan bantuan teknis maupun keuangan pada negara. Dan perspektif normative yang menekankan pada pengontrolan informasi dan legitimasi.

3.1 Pengawasan oleh FAO

FAO sebagai organisasi internasional dalam bidang pertanian dan pangan yang memiliki visi misi menerapkan ketahanan pangan dan pertanian sehingga tidak adanya gizi buruk di Dunia. Masuknya FAO dalam menangani krisis pangan di Sudan ini diawali dengan Lembaga swadaya masyarakat Sudan, yaitu NESI bersama pemerintah Sudan menyuarakan keadaan krisis pangan darurat yang ekstrem di Sudan melalui seruan laporannya pada PBB pada bulan Mei 2020. Yang mana akhirnya, sesuai dengan visi misi dan norma FAO menangani isu krisis pangan di Sudan yang ekstrem dimulai pada Mei 2020.

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian pada isu krisis pangan ekstrem di Sudan tahun 2020,FAO melakukan monitoring. Dan hal tersebut ada pada salah satu variabel dari perspektif managerial dalam teori implementasi organisasi internasional yaitu organisasi internasional melakukan pengawasan terhadap negara. Pengawasan bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, bentuk metode pengawasan ini adalah dengan melakukan pengawasan untuk mengetahui secara detail apa yang sedang menjadi urgensi, dan memantau sebuah keadaan sehingga dapat dianalisis strategi apa yang harus dilakukan guna mengatasi hal yang menjadi urgensi sehingga terbentuklah sebuah solusi untuk mengatasi urgensi tersebut (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008).

Dalam pengawasan ini, FAO melakukan metode monitoring untuk mengawasi bagaimana kondisi ketahanan pangan di Sudan akibat COVID-19 dan banjir bandang. monitoring ini dapat terlaksana karena adanya pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat yang mana FAO berhasil meluncurkan proyek pengawasan monitoring dengan aktivitas meluncurkan pengumpulan data dan analisis data terkait COVID-19 guna memberikan masukan bagi program berbasis bukti di negara Sudan. Pengawasan ni dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2020 dengan kombinasi metode pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam aktivitas ini menggunakan responden utama yaitu melibatkan penyuluh dari Kementerian Pertanian Sudan. Pengawasan ini menggunakan metode wawancara terhadap warga Sudan seperti kepala rumah tangga, sampel wawancara terdiri dari 448 narasumber informasi dari 16 negara bagian negara Sudan (FAO,2020).

3.1.1 Pengawasan FAO bersama Kementerian Pertanian Sudan.

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan konsep *Managerial Approach* yang ada dalam teori Joachim dimana organisasi internasional melakukan monitoring bersama aktor lain untuk memantau dan mengawasi perkembangan atau

kekurangan. Keterlibatan aktor lain ini untuk membantu organisasi internasional melakukan analisis dan merupakan hal penting dalam sebuah implementasi. Hal tersebut telah diimplementasikan oleh FAO dalam penanganan isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020 dimana FAO melakukan monitoring bersama Kementerian Pertanian Sudan melalui program ACFASM (*Annual Crop and Food Security Assessment Mission*). ACFASM merupakan sebuah program yang merupakan perwujudan monitoring yang dilakukan FAO untuk mengatasi krisis pangan di Sudan. ACFASM ini diselenggarakan pada tahun 7 Desember 2020 hingga 17 Desember 2021 yang memiliki misi meneliti bagaimana dampak pandemi covid-19 pada sistem pertanian dan pangan untuk estimasi sereal produksi di Sudan Selatan selama tahun 2021 dan menilai situasi ketahanan pangan secara keseluruhan di Sudan (Cheeren 2020)

Program ini menggunakan metode pengisian kuesioner dengan menargetkan 500 staff untuk melakukan penyuluhan di 180 daerah di 18 kota bagian di Sudan. Pengawasan dengan mengumpulkan data informasi keadaan krisis pangan terbaru dari total 662 rumah tangga dan kepala keluarga. Data tersebut dikumpulkan oleh staf kementerian Negara Pertanian dan Sumber Daya Hewan (SMoAAR) di Darfur Utara dan kementerian negara produksi dan sumber Daya Ekonomi (SMoPER) di negara bagian Darfur Timur serta Unit Perencanaan Pertanian Sudan. Program ACFASM ini juga dilakukan untuk menilai bagaimana tinjauan komprehensif tentang makanan, kesehatan maupun ekonomi untuk memahami apa saja yang menjadi permasalahan dan hambatan krisis pangan di Sudan sehingga dari hasil pemantauan tersebut menghasilkan sebuah solusi untuk mendorong perubahan di tingkat federal untuk negara Sudan supaya ketahanan pangannya bisa kembali mencapai angka yang stabil (Food and Agriculture Organizations of the United Nations and World Food Programme 2022, 24-29).

Program ini merupakan misi yang merupakan bentuk penilaian tahunan yang dilakukan oleh FAO dengan dukungan berbagai mitra seperti *World Food Programme* (WFP), *Famine Early Warning System Network* (FEWS NET) serta USAID. Dalam misi ini, pandemi covid-19

memberikan keterbatasan dalam aspek penahanan metodologi yang telah dimodifikasi, biasanya program misi ini dilakukan dengan cara survei kepada staf tingkat Negara Bagian dengan cara mengumpulkan semua data atas permintaan staff federal dari *Food Security Technical Secretariat (FSTS)* dan *General Directorate of Planning and Agricultural Economics (GDPAE)* dalam program misi monitoring pengawasan ini dilakukan bersama *Ministry of Agriculture and Natural Resources (MoANR)* yang mana pelaksanaannya setahun sekali di Sudan (Food and Agriculture Organizations of the United nations 2022, 17-24).

Dalam misi ini tim terlibat dalam penelitian juga melakukan inspeksi turun lapangan di daerah pertanian yang mengalami dampak akut selama krisis pangan berlangsung selama pandemi covid 19 pada tahun 2020 hingga 2021. Dengan misi pengawasan ini, FAO beserta gabungan mitra internasional mendapatkan data dan penelitian dari perwakilan kantor-kantor pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta PBB. Dari data perwakilan mitra nasional maupun internasional mendapatkan data yang penting pada tahun 2020 hingga 2021 dimana harga sorgum dan millet mengalami lonjakan yang tinggi dimana harga produksi sangat tinggi daripada tahun 2019. Kemudian pada pertanian produk domestic bruto meningkat 65% dan diikuti kebutuhan pokok dan tanaman menjadi 33%. Kemudian, *International Monetary Fund (IMF)* melaporkan bahwa dalam sektor kehutanan mengalami lonjakan sekitar 8,5%. Selain itu, sektor produksi sereal juga mengalami kenaikan 8%. Produksi sorgum menjadi naik sekitar 35% dan millet naik mencapai 28% dibandingkan tahun 2019 (Food and Agriculture Organizations of the United nations 2022., 20-30).

Selain dari sektor pertanian dan pangan, hasil pengawasan dari pertemuan yang berlangsung dengan beberapa mitra internasional lainnya, FAO juga melaporkan bahwa sektor peternakan akibat covid-19 juga terganggu sehingga produksi lauk pauk dari hewani sangat terhambat. FAO menjelaskan bahwa peternakan terganggu karena banyak ternak yang terdampak penyakit. Hasil monitoring yang dilakukan FAO menegaskan bahwa tingginya

biaya tenaga kerja pertanian menyebabkan layanan transportasi berkurang sehingga ternak kekurangan distributor vaksin dan obat-obatan serta kekurangan pakan. biaya input pertanian yang menyebabkan harga pangan meningkat dan begitu pula dengan harga vaksin, obat-obatan dan biaya pakan bagi ternak. pembatasan aktivitas membuat ekspor ternak dan pertanian menurun. Adanya penutupan pasar juga menyebabkan kelangkaan yang tinggi sehingga kebutuhan pertanian untuk panen terhambat sehingga terjadi penundaan panen bahkan gagal panen pada tahun 2020, sehingga kerugian dalam panen pun terjadi. Adanya penutupan pasar ini juga menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dari bisnis sekunder walaupun dampaknya tidak terlalu besar. Pembatasan pergerakan tersebut juga sebagai pemicu tingginya biaya tenaga kerja pertanian (Abtala 2021)

Program ACFASM ini memantau dengan teliti di tahun 2020 hingga 2022 dengan penilaian tindak lanjut memantau dengan cermat bagaimana kondisi keamanan pangan karena inflasi yang tinggi akibat adanya covid-19. Selain itu adanya ACFASM juga meningkatkan pelaksanaan program nasional untuk melakukan perluasan produksi benih unggul yang dibagikan kepada petani Sudan. Selain itu dapat adanya promosi investasi dalam aset pertanian dan mesin yang mana bisa digunakan petani, dapat juga mempromosikan berbagai kegiatan untuk menambah nilai komoditas pertanian negara yang bisa diekspor. Misi program ACFASM yang melibatkan dukungan dari mitra internasional ini juga dapat meningkatkan kapasitas pertanian dan ternak baru untuk menyediakan data informasi terbaru sektor pertanian. Serta ACFASM ini juga untuk meningkatkan bagaimana pengobatan hama, pengobatan ternak, membangun program untuk kementerian negara dalam sektor pangan (Cheeren 2020).

Dalam kegiatan program ACFASM ini FAO mengumpulkan dasar untuk indikator proyek yang teridentifikasi untuk digunakan dalam proyek selanjutnya serta membantu mendefinisikan dan merancang ketahanan pangan untuk kedepannya untuk Negara Sudan.

Sehingga hasil pengawasan dan survey yang dihasilkan dapat menentukan program selanjutnya terkait mengatasi krisis pangan yang terjadi di Sudan

3.1.2 Pengawasan oleh FAO berdasarkan laporan Bank Dunia.

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan konsep *Managerial Approach* dimana organisasi internasional melakukan monitoring bersama aktor lain. Hal tersebut telah dilakukan oleh FAO dalam penanganan isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020. Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian FAO melakukan monitoring FAO bekerja sama dengan World Bank Global.

Dalam melakukan monitoring terkait pengumpulan data mengenai bagaimana kondisi isu krisis pangan di Sudan, FAO dibantu oleh World Bank Global. Isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020 merupakan krisis pangan terparah dan hal tersebut berdampak pula pada sektor perekonomian Sudan. Melihat hal tersebut FAO meminta bantuan kepada world bank global untuk memantau bagaimana kenaikan harga pangan dan ternak di Sudan. Hasil monitoring yang dilakukan oleh FAO bersama dengan world bank mengetahui berapa persen kenaikan harga pangan dan ternak dari tahun sebelumnya (World Bank Global 2023).

Hasil pemantauan tersebut ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Sudan mengalami kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuhan pokok pangan dan ternak. Melihat situasi tersebut world bank bersama FAO mengadakan konferensi kecil untuk melakukan perundingan mengenai permasalahan ketidakmampuan masyarakat Sudan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan ternak akibat harga yang terlalu tinggi. Konferensi FAO bersama world bank dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 yang membahas ide bantuan kemanusiaan apa yang akan diberikan untuk krisis pangan di Sudan (World Bank Global 2023).

3.1.3 Pengawasan oleh FAO berdasarkan laporan NESI (News Sudanese Indigenous NGO's South Sudan)

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian sesuai dengan konsep *Managerial Approach* dimana organisasi internasional melakukan monitoring bersama aktor lain. Hal tersebut telah dilakukan oleh FAO dalam penanganan isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020. Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian FAO melakukan monitoring bersama LSM lokal Sudan. LSM local Sudan yang terlibat dalam monitoring yaitu NESI (Malik 2022).

NESI merupakan lembaga swadaya masyarakat pribumi Sudan yang bersifat semi partai politik. Jaringan NESI Sudan ini berupaya untuk pembangunan jangka panjang Sudan dan untuk menyerukan kepada dunia internasional terkait kondisi krisis pangan yang serius di Sudan. FAO bersama dengan NESI. NESI bersama dengan FAO melakukan monitoring terkait apa yang menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh Sudan dalam krisis pangan yang sedang melanda yang kondisinya sangat memprihatinkan. Monitoring FAO bersama NESI ini berlangsung selama 2021 (Humanitarian Affairs 2021)

Dari hasil monitoring terkait apa yang dibutuhkan Sudan dalam menangani krisis pangan yang dilakukan FAO bersama NESI, adalah mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Sudan saat krisis pangan melanda sehingga mengetahui apa saja hal terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat Sudan selama krisis pangan (Humanitarian Affairs 2021). Sehingga FAO dapat mengambil langkah dan bergerak memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sudan.

3.2. Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Masalah Oleh FAO.

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian FAO melakukan peningkatan kapasitas. Salah satu variabel yang dimiliki oleh teori organisasi internasional dari

Joachim yaitu *Managerial Approach* dimana perwujudan variabel manajerial yang tercantum dalam teori Joachim diwujudkan dengan beberapa metode (Joachim, Reinalda, and Verrbeek 2008). Salah satu metode pelaksanaan dari teori managerial adalah dengan membantu negara dalam mengembangkan kapasitasnya sebagai bentuk penyelesaian masalah.

Dari yang sudah dijelaskan oleh penulis pada tulisan diatas, dimana FAO sudah melakukan monitoring pengawasan bersama berbagai aktor yang terlibat dalam kerja sama melakukan pengawasan. Dari monitoring yang sudah dilaksanakan maka FAO dapat mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi isu krisis pangan yang darurat di Sudan, dari hasil pengawasan maka FAO dapat menentukan langkah dan program apa untuk menyelesaikan masalah krisis pangan di Sudan dan melakukan peningkatan kapasitas yang memang dibutuhkan dari hasil monitoring yang sudah dilakukan.

3.2.1. Peningkatan Kapasitas dan Penyelesaian Masalah Oleh FAO Melalui Program FNS-REPRO.

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian FAO melakukan peningkatan kapasitas melalui program yang dibentuk. FNS-REPRO adalah program lanjutan yang berwujud tindakan setelah dilakukan program sebelumnya yaitu monitoring dalam program ACFASM. FNS-REPRO merupakan sebuah program ketahanan keamanan pangan dan gizi yang dibentuk oleh FAO yang dirancang untuk memperkuat ketahanan sistem pangan dan gizi di wilayah negara kawasan Afrika salah satunya adalah Sudan. Program yang prioritas utamanya adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi serta dividen perdamaian Sudan yakni Gum Arab yang merupakan komoditas ekspor utama bagi Sudan. Program FNS-REPRO ini didanai oleh pemerintah Belanda kepada Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan merupakan program yang membutuhkan dana sebesar USD 28 juta yang berkontribusi langsung terhadap operasional Dewan Keamanan PBB 2417 dengan

mengatasi permasalahan yang ada (Food and Agriculture Organization of the United Nations and Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands 2021, 2).

Periode program FNS-REPRO ini berjalan mulai Maret 2020 hingga September 2021 dengan area fokus meliputi Kota Renl,Akobo,Aweil,Wau,Yambio dengan tercatat penerima manfaat dari program ini sebesar 53.100 rumah tangga dengan anggaran USD 6,4 juta program FNS-REPRO ini di rancang khusus untuk mendorong perdamaian dan ketahanan pangan dalam skala besar. Program ini menerapkan pendekatan berbasis mata pencaharian dan ketahanan di beberapa wilayah Sudan yang kondisi kestabilan nya terburuk,dimana intervensi biasanya hanya bersifat kemanusiaan. Program ini mendorong FAO dan mitra yang terlibat memberikan contoh yang baik tentang bagaimana membangun ketahanan sistem pangan dalam krisis yang berkepanjangan dan memperkuat kerja sama di seluruh hubungan kemanusiaan,pembangunan untuk mewujudkan kestabilan pangan (Kenvi 2022).

FNS-REPRO memiliki rantai yang dijelaskan pada prinsip dasarnya yaitu “Jika kekhususan penghidupan lokal dan ketahanan sistem pangan di wilayah tertentu di Sudan, Somalia, dan Sudan Selatan dipahami oleh pemangku kepentingan lokal dan internasional, dan jika para pemangku kepentingan tersebut menyesuaikan intervensi mereka,berdasarkan kenyataan di lapangan dan bukti keberhasilan, dan jika mereka berhasil menciptakan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, maka ketahanan mata pencaharian dan sistem pangan secara keseluruhan di wilayah krisis yang berkepanjangan akan meningkat, sehingga berkontribusi dalam mengatasi akar penyebab kerawanan pangan, malnutrisi, destabilisasi, pengungsian paksa dan migrasi tidak teratur. FNS-REPRO telah dirancang untuk melakukan hal ini dengan menggabungkan intervensi yang bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi dan kesetaraan, menggunakan pendekatan berbasis kawasan yang sensitif secara ekologis dan konflik” (Reouden 2021).

Program ini akan membantu masyarakat untuk memperkuat ketahanan penghidupan mereka dengan membangun kapasitas mereka untuk menyerap dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan dan tekanan pada sistem pangan dan membangun lembaga berbasis masyarakat yang membantu mengubah paparan mereka terhadap risiko. Hal ini berarti membantu masyarakat untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan mencegah krisis; merespons secara efektif ketika krisis benar-benar terjadi, dan; berinvestasi dalam pemulihan yang lebih kuat dan penghidupan yang berketahanan. Sambil memilih secara strategis intervensi yang mempunyai efek transformatif terhadap ketahanan sistem pangan” (Reouden 2021).

Pada tahun 2020 hingga 2021 kasus krisis pangan di Sudan selatan mengalami kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi di tahun sebelumnya, lebih dari 6 juta orang menghadapi kerawanan pangan yang akut dan sekitar 2 juta orang menjadi pengungsi internal dalam situasi konflik bersenjata. meskipun demikian, masyarakat Sudan masih mampu memproduksi benih dengan memanfaatkan kapasitas sumber daya seadanya, walaupun hasil produksi kualitas dan jumlahnya menurun drastis. Sektor benih telah dipilih sebagai titik masuk rantai nilai FNS-REPRO di Sudan. Dimana hal tersebut terdapat peluang untuk mengembangkan rantai nilai di sektor benih. pertama dan terpenting dengan tujuan untuk menutup kesenjangan produksi sereal dan meningkatkan produksi sereal. Serta menyediakan produk yang lebih memadai untuk penduduk lokal yang mana dapat meningkatkan nilai ekspor di pasar lokal maupun internasional (Wageningen University 2021, 34-42).

Dalam program FNS-REPRO ini, hasil keseluruhan dari program ini adalah mata pencaharian dan sistem pangan yang berketahanan dan kontribusi terhadap perdamaian lokal. hal tersebut dicapai melalui :

- a. Peningkatan akses inklusif dan pengelolaan sumber daya alam.
- b. Peluang penghidupan dan pendapatan yang lebih besar di sepanjang rantai nilai terpilih.

- c. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam mendukung penghidupan yang sensitif terhadap gizi.
- d. Peningkatan kebijakan dan praktik mengenai ketahanan sistem pangan.

Selain itu, dalam program FNS-REPRO ini peningkatan ketahanan dan status ketahanan pangannya dicapai dengan cara:

1. Mengatasi kendala aksesibilitas, ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas benih berkualitas.
2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pembentukan sistem pembenihan yang terpadu.
3. Memperkuat saluran formal dan informal serta pasar lokal untuk input pertanian melalui dukungan kepada organisasi petani dan pengusaha kecil untuk secara efektif menjembatani penyampaian input pertanian yang lebih baik kepada petani kecil.

Program FNS-REPRO dirancang oleh FAO dengan komponen (pembelajaran) regional khusus. kegiatan regional ini memperkuat data dan informasi pakan ternak serta sistem dan alat pelaporan dan komunikasi. Laporan kemajuan tahunan FNS-REPRO memberikan gambaran umum kemajuan yang dicapai FAO di Sudan sehubungan dengan komponen proyek FNS-REPRO:

Meskipun ada pembatasan COVID-19, FNS-REPRO menjangkau 3.000 penerima manfaat di negara bagian Darfur Utara dan Timur, yang menerima benih pangan dan tanaman komersial serta peralatan pertanian. Pelatihan pemanenan dan pasca panen karet Arab yang baik mencakup sekitar 10% dari total jumlah penerima manfaat yang dijangkau, yang akan mentransfer keterampilan dan pengetahuan kepada rekan-rekan mereka. Perlu disebutkan bahwa hampir tidak ada penerima manfaat yang terlibat dalam praktik pascapanen sebelumnya. FAO dalam FNS-REPRO telah melakukan berbagai tindakan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pengadaan dan distribusi benih dan peralatan pertanian kepada penerima manfaat proyek.
2. Distribusi benih sereal dan gum arab arab jens acacia senegal sebanyak 48.000 bibit kepada penerima manfaat di negara bagian Darfur Sudan.
3. Pembuatan modul pelatihan dalam bahasa Arab mengenai praktik permanen dan pasca panen terkait gum arab dan sereal. Gum arab dan sereal merupakan salah satu makanan pokok FAO yang mana mengalami penurunan produksi, salah satu permasalahan produksinya di tengah krisis pangan adalah petani menggunakan penyadapan tradisional sehingga keuntungan yang baik masih minim didapatkan. FAO mengadakan pelatihan untuk petani kepala keluarga Sudan terkait penyadapan yang baik, pelatihan tentang wanatani dan mengenai pasca panen sebagai pemicu kemajuan produksi sereal dan gum arab.
4. Adanya pembentukan komite pembangunan perdamaian dan pengelolaan sumber daya alam di Darfur Timur

Tabel 3.2.1.1. Penerima Manfaat Program FNS-REPRO

Kategori Penerima Manfaat	Pria	Perempuan	Total Penerima Manfaat
Miskin	3%	3% - 2%	4%
Sedang	27%	38%-32%	27%
Tinggi	70%	59%-66%	69%

Hasil survei terkait program FNS-REPRO mencatat bahwa 100% rumah tangga menerima manfaat dari bantuan yang diberikan oleh FAO melalui program FNS-REPRO. Sekitar 40% rumah tangga mengkonsumsi buah-buahan dalam 24 jam terakhir. Rata-rata satu

rumah tangga di wilayah penerima manfaat mengonsumsi 12 jenis makanan dalam 24 jam. Rumah tangga yang dikepalai laki-laki cenderung memiliki keragaman penerima manfaat yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Terdapat tingginya konsumsi sereal, minyak gula di wilayah penerima manfaat sementara sumber protein terutama daging dan susu sangat sedikit. Penerima manfaat terkait ternak memiliki angka yang rendah (Elke 2021).

Tabel 3.2.1.2 Total Penerima Manfaat Program FNS-REPRO

Prevalensi Kerawanan Pangan	Penerima Manfaat	Bukan Penerima Manfaat	Keseluruhan
Kerawanan Pangan Yang parah	8%	10%	13%
Cukup Rawan Pangan	36%	35%	33%

Tabel diatas merupakan ukuran kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan apakah mereka mengalami aspek kerawanan pangan tertentu atau tidak. Sekitar 8% penerima manfaat merasa sangat tidak aman pangan, dibandingkan dengan 13% pada non penerima manfaat. Sekitar sepertiga (36%) merasa cukup rawan pangan (36% penerima manfaat, 33% bukan penerima manfaat). Perbedaan antara penerima manfaat dan non-penerima manfaat tidak berbeda secara statist .

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam laporan analisis konteks multi-disiplin Sudan (2020), “tanaman terpenting untuk ketahanan pangan di wilayah REPRO Darfur Utara dan Timur adalah millet, sorgum, kacang tanah, wijen, biji semangka, dan kembang sepatu. Kebun

sayur banyak ditemukan di daerah sepanjang sungai (misalnya Desa Maba di Pedesaan El Fasher dan Sag el Naam di Kalimando) dan di desa-desa yang tersedia sumur dangkal (Broush). Jumlah orang yang terlibat dalam produksi sayuran (misalnya tomat, okra, dan bawang bombay) selama musim dingin sangatlah sedikit. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya akses dan ketersediaan skema irigasi tambahan. Akibatnya, produksi sayuran di daerah sasaran sebagian besar dilakukan oleh masyarakat kaya yang mampu mengakses air. (Kusters 2022).

Persiapan lahan dilakukan dengan cara tradisional dan tidak ada praktik pertanian konservasi yang dilaporkan. Meskipun rata-rata setiap petani menanam tanaman yang berbeda, tidak ada metode tumpang sari dalam agroforestri yang diterapkan. Penggunaan pupuk kimia atau organik tidak dilaporkan, begitu pula penggunaan pestisida untuk mengendalikan gulma” (Hsiao 2020,19-23).

Disisi lain, karena pembatasan COVID-19, kegiatan pelaksanaan proyek di lapangan dan prosedur pengadaan tertunda. Tindakan yang diambil untuk melanjutkan pelaksanaan proyek dan sebisa mungkin mengurangi penundaan ini termasuk penggunaan modalitas teleworking untuk staf yang terlibat dalam proyek, memastikan jarak sosial dan tindakan sanitasi yang tepat di lokasi proyek, dan pengurangan jumlah peserta dalam proyek. pertemuan dan lokakarya pelatihan. Selain itu, fluktuasi harga akibat devaluasi mata uang nasional mempengaruhi pembelian input. Misalnya, rencana pengadaan pada tahun 2020 mencakup pembelian benih kacang tanah sebesar 19 m untuk Darfur, namun karena masalah devaluasi, anggaran tersebut hanya cukup untuk 9MT” (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022).

3.2.2. Bantuan Financial dan Teknical Oleh FAO Untuk Krisis Pangan Sudan

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian FAO memberikan bantuan financial untuk Sudan. Salah satu aspek teori peran organisasi peran organisasi

internasional milik Joachim adalah managerial. Approach. Dalam managerial terdapat beberapa metode perwujudan salah satunya adalah adanya pemberian bantuan berupa finansial atau teknis yang diberikan organisasi internasional. Dan metode perwujudan tersebut sudah dilakukan oleh FAO terhadap Sudan. FAO memberikan beberapa bantuan kemanusiaan finansial terhadap Sudan untuk mengatasi permasalahan krisis pangan. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh penulis pada beberapa program yang sudah FAO laksanakan pada point tulisan diatas dan akan dijelaskan kembali terkait bantuan finansial lainnya yang sudah FAO berikan pada Sudan untuk mengatasi permasalahan krisis pangan (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022, 10-16).

Dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi bagi rumah tangga yang rentan di Sudan, FAO menyediakan 5.425 ton benih sereal, millet, sorgum untuk masyarakat Sudan. Selain itu, FAO juga menyalurkan bantuan 1,286 benih kacang-kacangan yang meliputi kacang tunggak, kacang gude, buncis. Di sisi lain, FAO juga memberikan 123,3 ton benih sayuran meliputi okra, labu kuning, tomat dan semangka. FAO juga menyediakan berbagai perkakas alat pertanian untuk petani Sudan meliputi alat cangkul penggali, bajak kedelai dan garpu tanam sebagai penunjang penanaman bahan pokok pangan Sudan karena dari hasil monitoring selama krisis pangan Sudan pangan mengalami gangguan produksi dan gangguan penanaman, dan FAO memberikan alat-alat bantuan pertanian tersebut sebanyak 1.031.340 perkakas alat pertanian (Elke 2021).

Serta FAO menyediakan drum penyimpanan yang kedap air untuk keamanan penyimpanan benih untuk membatasi kerugian pascapanen. Serta FAO menyediakan bantuan tunai sebesar USD 40 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan yang mendesak dan darurat di belakang, USD 40 juta terbesar sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan benih, alat teknis pertanian serta bantuan bahan pangan pokok. Bantuan finansial kemanusiaan dan teknis tersebut oleh FAO dialokasikan untuk 540.000 rumah tangga sebagai peningkatan

ketahanan pangan gizi serta mendukung produksi tanaman pangan pokok seperti sereal, gandum dan sayuran (Food and Agriculture Organization of the United Nations 2022, 3-10).

Selain bantuan berwujud teknis, FAO juga memberikan bantuan uang tunai sebesar 35 juta dollar yang merupakan anggaran dari FAO yang dibagikan kepada kepala rumah tangga di provinsi yang memiliki tingkat krisis pangan paling besar seperti Khartoum, Nil biru, Darfur dan Kordofan. Pembagian tersebut juga diiringi oleh monitoring oleh FAO agar dana yang diberikan digunakan dengan misi FAO yaitu untuk pembelian bahan pangan pokok seperti gandum, millet, sorghum dan gizi dari pangan hewani. Hal tersebut dilakukan oleh FAO sebagai aspek pendukung untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Sudan, supaya masyarakat Sudan mampu membeli kebutuhan bahan pangan pokok, yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi akibat kelangkaan produksi pangan. Bantuan financial dan teknis yang dilakukan oleh FAO tersebut merupakan bentuk penyelesaian masalah yang dilakukan oleh FAO untuk Sudan, dimana hal tersebut merupakan solusi masalah utama masyarakat Sudan yaitu FAO masyarakat Sudan tidak mampu membeli bahan makanan pokok dengan harga tinggi. Bantuan financial FAO berbentuk uang tunai ini sebagai salah satu jalan keluar FAO supaya masyarakat Sudan bisa terbantu dalam memenuhi pangan pokok (Kenvi 2022).

3.3. Otoritas dan Legitimasi FAO dalam mengatasi krisis pangan dan pertanian di Sudan

Salah satu parameter teori implementasi organisasi internasional yang dimiliki oleh Joachim, yaitu *Normative Approach*. FAO sudah melakukan perannya sesuai dengan parameter normative approach. Hal tersebut ditunjukkan oleh negara yang bersangkutan yaitu Sudan, telah memberikan kepercayaan pada FAO dimana pemerintah Sudan dan LSM local Sudan

yaitu NESI membuat seruan laporan tentang krisis pangan pada FAO melalui PBB untuk terjun membantu Sudan mengatasi krisis pangan ekstrem pada tahun 2020 (Malik 2022).

Dalam terjun berperan menangani isu krisis pangan yang ekstrem di Sudan pada tahun 2020, tidak hanya berdasarkan kondisi krisis pangan yang ekstrem dan darurat akan tetapi hal tersebut dikarenakan FAO juga memiliki sebuah mandate norma. Dimana norma yang dimiliki oleh FAO adalah untuk menerapkan ketahanan pangan dan ketahanan pertanian di dunia sehingga dunia bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi. Melihat kondisi krisis pangan di Sudan yang memprihatinkan, sebagai organisasi internasional bidang pangan dan pertanian, FAO masuk ke negara Sudan untuk membantu Sudan keluar dari permasalahan pangan darurat, sesuai dengan norma yang dimiliki oleh FAO (Kusters 2022).

Dalam melakukan sebuah implementasi *normative approach*, yang mana sebuah organisasi internasional diberi kepercayaan untuk melakukan tugasnya oleh negara bersangkutan melalui control informasi, keahlian serta pelatihan dari Organisasi internasional. Hal tersebut sudah dilakukan oleh FAO, dimana FAO memiliki sebuah program untuk warga Sudan yaitu FNS-Repro dimana selain sebagai penyelesaian masalah dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan panen dan pasca panen terhadap bahan makanan pokok, hal tersebut sebagai salah satu penerapan implementasi *Normative Approach* dimana FAO diberi kepercayaan masyarakat Sudan untuk melakukan sebuah tindakan yang membantu Sudan keluar dari permasalahan krisis pangan. Serta tidak hanya itu, dalam aspek *normative approach*, organisasi internasional melakukan control informasi dan hal tersebut sudah dilakukan oleh FAO dalam menangani isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020. Dimana setiap program kegiatan yang dilakukan oleh FAO untuk Sudan FAO melakukan control informasi terkait bagaimana pelaksanaan program tersebut, control informasi tersebut terkait dengan bagaimana program tersebut berjalan dan apa yang menjadi evaluasi serta kendala bagi FAO saat menjalankan program tersebut. Kontrol informasi tersebut dapat ditunjukkan melalui

laporan bulanan, bahkan tahunan FAO saat melakukan perannya dalam isu krisis pangan di Sudan pada tahun 2020.

Dalam melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian yang dilakukan oleh FAO untuk mengatasi krisis pangan Sudan adalah melakukan penurunan legitimasi aturan sesuai dengan norma yang dimiliki oleh FAO. Seperti yang sudah dijelaskan penulis pada point sebelumnya FAO memiliki program pelatihan terkait pengolahan panen dan pasca panen bagi masyarakat Sudan untuk mengurangi gagal panen yang menjadi salah satu penyebab krisis pangan di Sudan dan program pelatihan tersebut salah satu implementasi norma FAO untuk mengatasi krisis pangan. FAO juga memberikan berbagai macam bantuan kemanusiaan dan finansial untuk FAO salah satunya dengan pemberian bantuan peralatan pertanian sebagai penunjang kelancaran pelatihan penanaman dan panen (Food and Agriculture Organization of the United Nations and Funded by European Union 2022, 38-45).

Adanya 2 program tersebut, FAO menurunkan sebuah legitimasi aturan kepada masyarakat Sudan terkhusus untuk kepala keluarga yang menjadi anggota pelatihan dan penerima bantuan finansial berupa alat pertanian. Dimana FAO mewajibkan penerapan praktik pelatihan pada penanaman dan panen bahan makanan pokok menggunakan peralatan yang sudah FAO berikan. Hal tersebut tentunya tidak hanya diturunkan akan tetapi dimonitoring oleh FAO terkait pelaksanaan legitimasi yang sudah diturunkan (Kusters 2022)

Table 3.3 Peta Konsep Penerapan Teori Implementasi Ketahanan Pangan dan Pertanian oleh FAO

Konsep Teori	Implementasi Konsep Teori oleh FAO
<i>Managerial Approach</i>	1. Monitoring melalui program ACFASM dengan berbagai aktor terlibat seperti : world bank, kementran pertanian, WFP, LSM local Sudan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bantuan Financial oleh FAO untuk Sudan berupa uang tunai sebesar 35 juta dollar yang dibagikan kepada kepala rumah tangga di provinsi Sudan yang memiliki angka krisis pangan terparah supaya masyarakat Sudan mampu membeli bahan makanan pokok yang harganya tinggi. 3. Bantuan teknisi oleh FAO untuk Sudan berupa bantuan alat-alat pertanian sebagai penunjang keberhasilan produksi bahan pangan pokok seperti gandum,sorghum,millet. 4. Pembangunan kapasitas dan penyelesaian masalah oleh FAO,melalui program FNS- REPRO berupa pelatihan terkait panen dan pascapanen dalam penanaman bahan makanan pokok dan pengalokasian bantuan benih bahan makanan pokok.
<p>Normative Approach</p>	<p>FAO diberikan kepercayaan oleh masyarakat Sudan untuk mengatasi krisis pangan di Sudan. Ditunjukkan oleh adanya seruan dari pemerintah Sudan dan LSM Sudan meminta bantuan pada FAO. FAO terjun menangani isu krisis pangan di Sudan bukan hanya atas dasar kepercayaan masyarakat Sudan,akan tetapi FAO memiliki norma yang harus dijalankan dalam melakukan implementasi tugasnya sebagai organisasi nasional. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh FAO,implementasi yang dilakukan oleh FAO melalui program yang dibuat untuk mengatasi isu krisis pangan di Sudan 2020 dan diiringi dengan monitoring sebagai control informasi, hal tersebut merupakan penerapan parameter normative approach.</p>

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai organisasi internasional, FAO melakukan implementasi sebagai organisasi internasional pada isu krisis pangan di Sudan. Implementasi yang dilakukan sebagai organisasi internasional merujuk pada implementasi Normative Approach dan Managerial Approach menurut Joachim. karena kedua variabel tersebut yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan FAO untuk membantu Sudan dalam menangani krisis pangan sebagai pelaksanaan visi misinya. Dimana dalam parameter teori *Managerial Approach* yang berisi monitoring, bantuan financial, teknisi serta pembangunan kapasitas dan penyelesaian masalah, hal tersebut yang dilakukan FAO dalam isu krisis pangan di Sudan. Serta parameter *Normative Approach* juga dilakukan oleh FAO pada isu krisis pangan di Sudan yaitu FAO menekankan otoritas legitimasi diiringi dengan control informasi

Sebagai organisasi internasional yang terjun dalam permasalahan isu krisis pangan dalam melakukan implementasi Managerial Approach adanya program FNS-REPRO sebagai wujud monitoring, dimana dalam hal tersebut banyak aktor yang terlibat seperti WFP, LSM Lokal Sudan, Kementrian Pertanian dan World Bank Global yang mana hal tersebut berada dalam aspek Managerial Approach. Selanjutnya, adanya pembangunan kapasitas dan penyelesaian masalah melalui program FNS-REPRO, dimana adanya bantuan uang tunai pada masyarakat Sudan sebagai salah satu cara supaya masyarakat Sudan dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok, serta adanya pembangunan kapasitas melalui pelatihan panen dan pasca panen yang didukung oleh bantuan teknisi yaitu adanya sumbangan alat pertanian dan benih bahan makanan pokok. Dalam melakukan implementasi sebagai organisasi internasional, FAO sudah melakukan apa yang ada dalam cakupan aspek teori tersebut.

Selanjutnya, sebagai organisasi internasional FAO juga melakukan implementasi Normative Approach dimana oleh FAO yaitu, diberikan kepercayaan oleh masyarakat Sudan untuk mengatasi krisis pangan di Sudan. Ditunjukkan oleh adanya seruan dari pemerintah Sudan dan LSM Sudan meminta bantuan pada FAO. FAO terjun menangani isu krisis pangan di Sudan bukan hanya atas dasar kepercayaan masyarakat Sudan, akan tetapi FAO memiliki norma yang harus dijalankan dalam melakukan implementasi tugasnya sebagai organisasi nasional. Dan hal tersebut sudah dilakukan oleh FAO, implementasi yang dilakukan oleh FAO melalui program yang dibuat untuk mengatasi isu krisis pangan di Sudan 2020 dan diiringi dengan monitoring sebagai control informasi, hal tersebut merupakan penerapan parameter *Normative Approach*.

Dalam melakukan implementasi sebagai organisasi internasional, dari apa yang sudah diterapkan mulai dari Normative Approach dan Managerial Approach hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan bagi Sudan. Hal tersebut dapat dilihat dari angka penurunan masyarakat saat mengalami krisis pangan di Sudan tahun 2022 sudah mulai menurun dibandingkan tahun 2020 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan memiliki dampak yang cukup baik bagi masyarakat Sudan dan membuktikan bahwa sebagai organisasi internasional di bidang pangan dan pertanian mampu melakukan implementasi sesuai dengan norma yang dimiliki melalui isu krisis pangan ekstrem di Sudan.

4.2 Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan dalam penelitian ini agar penelitian terkait tema ini bisa lebih baik dan lengkap. Pertama, peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih dalam mengenai apakah ada sanksi yang diturunkan FAO pada Sudan saat melakukan implementasi ketahanan pangan dan pertanian di Sudan. Sanksi tersebut merujuk pada sifat dari peran teori organisasi internasional Joachim yaitu “memaksa”.

DAFTAR PUSTAKA

Abishkar. 2021. "Food system resilience assessment in Torit County, South Sudan : Food and Nutrition Security Resilience Programme (REPRO) South Sudan Programme." *Wagenigen University Volume 3 no 1* 22-27.

Abtala, Eltayed Mohamadien. 2021. "The determinants of food security in Sudan: the case of Kassala state." *World Journal of Science Volume 18* 19.

Ahmed, Allam. 2022. "Inconsistency of food security information in Sudan." *International of Journal Volume 45 No 21* 12.

Ahmed, Shamsedin Musa. 2021. "Impacts of drought, food security policy and climate change on performance of irrigation schemes in Sub-saharan Africa: The case of Sudan." *Agricultural Water Management Volume 232*.

Alexander Prosekov. 2018. "Food security: The challenge of the present." *ELSEVIER GEOFORUM Volume 91. Food Security, Nutrition (March): 73. 0016-7185*.

Andersen. 2009. "Food security: definition and measurement." *SpringerLink, Food Security (January), no 5. <https://doi.org/10.1007/s12571-008-0002-y>*.

Alles, Larissa. 2020. "Missiles and Food: Sudan's Man-Made Food Security Crisis," *Volume 4.No 1.(May):14 (Osala 2021)*

BBC News. 2020. "Krisis Yaman: Separuh Warga Sudan Menghadapi 'Kondisi Pra-Kelaparan.'" 2020. (June) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia/45974151>

Brockman, Jorn. 2022. "Monitoring Services for Food Security – Successful." *SudeneseFood Volume 18 No 1 DOI: 10.1127/1432-8364/2013/0192* 14.

Cheeren, Malkowsky. 2020. "Building seed system resilience in protracted crisis situations. : Seed system resilience assessment and facilitation tool (SSRA-FT)." *Wageningen Centre for Development Innovation* 17-19. Volume 11 No 1:14-18

Elke, Boereme. 2021. "FNS-REPRO South Sudan key findings report : Key findings emerging from the FNS-REPRO generated studies and other sources as input for the sensemaking events and adaptive programming." *Wageningen University* Volume 8 No 5:38.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2020. "Special Report ACFASM." *2020 FAO Crop And Food Supply Assessment Mission (CFSAM) To The Sudan 2*, Volume 3 no. 1 (Februari): 12. <https://doi.org/10.4060/ca7787en>.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2021. "national agrifood system and COVID 19 in the Sudan." *effects,policy responses and long-term implications*, Volume 5 no.13(Februari). 978-92-5-134490-3.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2021. "ANALYSING RESILIENCE FOR BETTER TARGETING AND ACTION." *Food and Nutrition Security Resilience Programme In The Sudan Baseline Report 5*, Volume 11,. no. 2 (September): 27-36. <https://doi.org/10.4060/cb5199en>.

Food and Agriculture Organization of the United Nations and Funded by European Union. 2022. "Agrifood systems and COVID-19." *Analysis of policy responses in countries with food crisis situations (2020-2021)*Volume 11.No 1 1 (1): 38-45. <https://doi.org/10.4060/cb8608en>.

Food and Agriculture Organization of the United Nations and Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands. 2021. "briefing note-south Sudan." *Food and Nutrition Security Resilience Programme Building food system resilience in protracted crises 3*, Volume 5 no.1 (August): 34-42. <https://doi.org/10.18174/551847>.

Food and Agriculture Organizations of the United Nations and World Food Programme. 2022. "Special Report." *2021 FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission (CFASM) To The Republic Of South Sudan* 3, no. 1 (June): 20-24.
<https://doi.org/10.4060/cc0474en>.

Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Food Programme. 2022. "The Impact of COVID-19 on Gender Equality and Food Security in the Arab region with a focus on the Sudan and Iraq." *The Impact of COVID-19 on Gender Equality and Food Security in the Arab region with a focus on the Sudan and Iraq*, no 1. food security, 18.

Global Network Against Food Crises. 2020. "September 2020 Update In Times of COVID-19." *2020 Global Report On Food Crises*.

Hartadi, Fristy Nabila Putri. 2022. "Analisa WFP,PBB,FAO Dalam Menangani Krisis Pangan Di Sudan Selatan Tahun 2021.,," volume 14,.no 4.(September): 42.

Herforth. 2020. *Cost and affordability of healthy diets across and within countries Background paper for the state of food security and Nutrition in the world 2020*. No 2.food security South Sudan (March).24

Ibushra. 2020. "food security in sudan a historical analysis food availability." *Iraqi Journal of Agricultural Sciences* 51, no 2. food security (July). 51(1):422-431.

Jan England. 2013. *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. N.p.: Oxford University. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199588862.013.0020>.

Jaspars, Susanne. 2020. "University of London." *Protracted crisis, food security and the fantasy of resilience in Sudan* 52(3), no 1. 195-212 (July): 197.
<https://doi.org/10.1177/0967010620927279>.

Joachim, Jutta, Bob Reinalda, and Bertjan Verbeek. 2008. "International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities."14-30

Kenvi, Boereme. 2022. "FNS-REPRO Sensemaking workshop report South Sudan : Report of a sensemaking workshop held on 22-23 July 2022 with FNS-REPRO and keypartners and stakeholders." *Wageningen Centre for Development Innovation* 10. Volume 9.,no.12 :13-15

Kusters, Abdalla. 2022. "FNS-REPRO Sudan - Key Findings from literature review, rapid Gum Arabic value chain assessment and stories of change : report on key findings that emerged from a literature review on the Gum Arabic value chain in Sudan, a rapid Gum Arabic value chain asse." *Wagenigen University Volume 3no 9* 13.

Kementerian Perencanaan dan Kerjasama Internasional Sudan. 2022. "Sudan National Food Security Strategy: Overview and Action Plan." Volume 21, no.3 (October);13-17

Malik, Abdullahi Tambul El. 2022. "Publishing research in a second language: The case of NESI contributors to food security in Sudan 2020." *Volume 7 No 2* 8-10.

Nasution, Ade Irma Suriana. 2022. "PERAN FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM MENGATASI KRISIS PANGAN DI Sudan Selatan pada Tahun 2020." *Jom FISIP Volume 2 No 1* 4.

Norwegian Refugee Council. 2021. "Initial Rapid Assessment Abyan and Hajjah IDPs (Sudan)." <https://reliefweb.int/report/Sudan/initial-rapid-assessment-abyan-and-hajjah-idps-yemen>.

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2021. "LSM Pribumi Sudan Baru (NESI)Mengkonsolidasi Permohonan Darurat Krisis Pangan." no 2.food security South Sudan (March).19

Osala, Samiati. 2021. "Food security in Sudan: the case of Kassala state." *World Journal of Science Volume 3 No 2* 11-18.

OXFAM. 2021. "Sudan: Fragile Lives in Hungry Times." <https://www.oxfam.org/en/research/sudan-fragile-lives-hungry-times>. Volume 11. No.11.(June): 12-11/9.12.20.2023

Pangestu, Ragil Panggih. 2022. "Peran World Food Programme (WFP) bersama FAO dalam Mengatasi Krisis Pangan di Sudan (2020-2021)." Yogyakarta. Volume 24,no 3.(December):20-23

Patricia Justino. 2020. "Pathways to achieving food security,sustainable peace and gender equality: Evidence From three FAO interventions." *Justino* 38, no 1. conflict,food security (January): 89. 10.1111/dpr.12413.

Philippe Re'gnier. 2011. "The emerging concept of humanitarian diplomacy: identification of a community of practice and prospects for international recognition." *International Review of the Red Cross* volume 93 Number 884, no 3. humanitarian diplomacy (December): 1213. doi:10.1017/S1816383112000574.

Saed, Elwasila. 2021. "CLIMATE CHANGE, AGRICULTURAL PRODUCTION AND FOOD SECURITY IN SUDAN ." *Journal of Economics Research Volume 3 No 1*.

Sani, Artian Cipta. 2021. "Peran World Food Programme (WFP) Dalam Mengatasi Krisis Pangan Di Sudan Selatan Pada Tahun 2021."Volume 1.,no 2.(December):30-36

Shamseddin Musa Ahmed. 2020. "Impacts of drought, food security policy and climate change on performance of irrigation schemes in Sub-saharan Africa: The case of Sudan." *Elsevier* 2323, no 2. food security (April). 10.1016.

Susanne Jaspars. 2021. "Protracted crisis, food security and the fantasy of resilience in Sudan." *Security Dialogue* Volume 52, no 1. Conflict, food security, governmentality, medicalization, resilience, Sudan (March): 197-200. 10.1 177/0967010620927279.

Swadevi, Wayan Yulia, Putu Ratih, Kumala Dewi, and Adi P Suwecawangsa. 2022. "Hambatan Pemerintah Sudan Dalam Mengelola Krisis Pangan bersama World Food

Programme Tahun 2020-2021.”Volume 13, no 3. Food security,Sudan (September): 19-21.
22.1019

UN News. 2022. “Humanitarian Crisis in Sudan Remains the Worst in the World, Warns UN.” 2022. <https://news.un.org/en/story/2019/02/1032871>.

Quraish Sserwanja, Mohammed B. Adam, Joseph Kawuki, and Emmanuel Olal. 2021. “Conflict and Health.” *COVID-19 in conflict border regions: a case of South Kordofan, Sudan*, no 5. Sudan,Covid-19, 4

WFP, FAO, UNICEF, FSAC, and Government of Sudan 2021. “Emergency Food Security and Nutrition Assessment(EFSNA)in Sudan.” Volume 3.,no1. (June): 30-36
<https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-security-and-nutritionassessment-efsna-june-2>

World Bank Global. 2023. “Bank Dunia memiliki portofolio senilai sekitar \$1 miliar di Sudan di bidang pendidikan,kesehatan,pengelolaan sumber daya alam,dan perlindungan sosial.” The World Bank.

World Food Programme. 2021. “Pemerintah Sudan,FAO dan WFP memblokiir investasi di bidang pertanian Sudan Karena Jumlah Orang Yang Menghadapi Kerawanan Pangan Akut Mencapai Rekor Tertinggi.”

